

Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam
Socioemotional Reconciliation Konflik Kosovo dan Serbia
Tahun 2008 – 2016

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan
Minat Utama *International Security and Peace*



Oleh:

Ifan Maududi Aminul Kalam

135120407113024

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

LEMBAR PERSETUJUAN

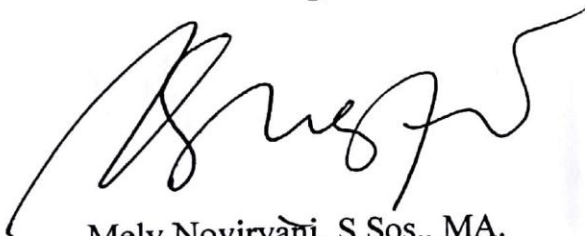
Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam
Socioemotional Reconciliation Konflik Kosovo dan Serbia
Tahun 2008 – 2016

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Ifan Maududi Aminul Kalam
NIM. 135120407113024

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama



Mely Noviryani, S.Sos., MA.
NIK. 2007077409112001

Pembimbing Pendamping



Joko Purnomo, S.IP., MA.
NIP. 197804012009121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswini Arisanto Azis, S.P., M.DevSt
NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

**Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam
Socioemotional Reconciliation Konflik Kosovo dan Serbia
Tahun 2008 – 2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Ifan Maududi Aminul Kalam
NIM. 135120407113024

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
pada tanggal 22 Desember 2017
Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji



Henny Rosalinda, S.IP., M.A.
NIP. 197908082014042001

Sekretaris Majelis Penguji



Irza Khurun'in, S.IP., MA.
NIK. 2017109105132001

Anggota Majelis Penguji I



Mely Noviryani, S.Sos., MA.
NIK. 2007077409112001

Anggota Majelis Penguji II



Joko Purnomo, S.IP., MA.
NIP. 197804012009121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Lufgdo, S.E, M.Si., Ak
NIP. 1962081419940210

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ifan Maududi Aminul Kalam

NIM : 135120407113024

Judul Skripsi : Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation* Konflik Kosovo dan Serbia Tahun 2008 – 2016

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya tulis merupakan hasil pemikiran saya sendiri. Di dalam skripsi ini tidak terdapat plagiarisme dari hasil tulisan orang lain. Hal – hal yang bukan hasil dari pemikiran saya, telah saya bubuhi kutipan melalui *footnote* dan daftar pustaka. Saya tidak melakukan pengutipan yang tidak sesuai dengan ketentuan sumber keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko ataupun sanksi akademik yang berlaku di Universitas Brawijaya apabila ditemukan pelanggaran atas skripsi yang telah saya tulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesungguhan dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Malang, 15 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



Ifan Maududi Aminul Kalam
NIM. 135120407113024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Beribu syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Penguasa semesta alam dan Pemberi cinta paling besar, karena-Nya penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation* Konflik Kosovo dan Serbia Tahun 2008 – 2016”**, penulis menyadari akan sangat sulit menyelesaikannya tanpa adanya bantuan dari pihak – pihak yang berkaitan. Penulisan skripsi ini juga jauh dari kata sempurna, maka penulis menerima kritik dan saran untuk hasil yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dalam pengembangan keilmuan Hubungan Internasional.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 15 Januari 2018

Ifan Maududi Aminul Kalam

**Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam
Socioemotional Reconciliation Konflik Kosovo dan Serbia
Tahun 2008 – 2016**

ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang kesiapan dua pihak berkonflik untuk memperbaiki hubungan damai pasca terjadinya tragedi *ethnic cleansing* yang melibatkan Kosovo dan Serbia. Praktik *ethnic cleansing* atau pembersihan etnis yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia terhadap etnis Albania yang tinggal di Kosovo meninggalkan emosi dan luka mendalam bagi para penyintas, mereka yang berhasil bertahan hidup sampai saat ini. Kolektifitas emosi yang terakumulasi dari generasi ke generasi membuat etnis Albania dan Serbia hidup berdekatan namun terperangkap dalam lingkaran permusuhan.

Pembahasan difokuskan pada kesiapan penyintas sebagai korban dan Pemerintah Serbia sebagai pelaku berusaha mengeliminasi hambatan emosi yang menghalangi keduanya untuk berdamai. Dalam penelitian ini pula dijelaskan bagaimana kondisi psikologis menjadi korban dan pelaku kejahatan perang. Tidak mudah kemudian merubah hubungan permusuhan yang telah terbentuk menjadi hubungan yang lebih damai, dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan tantangan yang dihadapi antara penyintas dan Pemerintah Serbia.

Melalui kerangka pikir *socioemotional reconciliation*, penulis akan mengetahui hal – hal apa saja yang membuat penyintas dan Pemerintah Serbia merasa siap untuk memperbaiki hubungan. Sehingga pada akhirnya, hasil dari penelitian ini akan menunjukkan seberapa jauh kesiapan penyintas dan Pemerintah Serbia dalam memperbaiki hubungan damai.

Kata Kunci: Penyintas, *Ethnic Cleansing*, Perdamaian, Kosovo, Serbia, Rekonsiliasi

**Readiness Survivors of Ethnic Cleansing and Serbian Government in
Socioemotional Reconciliation Kosovo and Serbia Conflict
2008 – 2016**

ABSTRACT

This thesis discusses the readiness of two conflicting parties to improve the peace relationship after the tragedy of ethnic cleansing involving Kosovo and Serbia. The ethnic cleansing or ethnic cleansing practices carried out by the Serbian Government against ethnic Albanians living in Kosovo leave emotions and deep wounds for the survivors, those who have survived to this day. The collectivity of emotions accumulated from generation to generation makes the ethnic Albanians and Serbs live close together but are caught in a circle of hostility.

The discussion focused on the readiness of survivors as victims and the Serbian Government as the perpetrator tried to eliminate the emotional barriers that prevented them from making peace. In this study also explained how the psychological conditions become victims and perpetrators of war crimes. It is not easy to change the relationship of hostility that has been formed into a more peaceful relationship, in this case the author tries to explain the challenges faced between survivors and the Government of Serbia.

Through the socioemotional reconciliation framework, the writer will know what things make survivors and the Serbian Government feel ready to improve relations. So in the end, the results of this study will show how far the preparedness of survivors and the Serbian Government in improving the peace relationship.

Keywords: Survivors, Ethnic Cleansing, Peace, Kosovo, Serbia, Reconciliation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR ORISINALITAS	3
KATA PENGANTAR	4
ABSTRAKSI	5
ABSTRACT	6
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Akademis	14
1.4.2 Praktis	14
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	15
2.1 Studi Terdahulu	16
2.2 Definisi Konseptual	20
2.2.1 Socioemotional Reconciliation	20
2.3 Operasionalisasi Konsep	30
2.4 Alur Pemikiran	34
2.5 Argumen Utama	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Teknik Analisis Data	37
3.5 Sistematika Penulisan	37
BAB IV PEMBAHASAN Dampak dan Upaya Resolusi Konflik Kosovo	38
4.1 Kosovo	38

4.1.1	Gambaran Umum	38
4.1.2	Sejarah dan Konflik Kosovo	40
4.2	Dampak Konflik Terhadap Perempuan Kosovo	51
4.2.1	Gender Based Violence	54
4.3	Upaya Resolusi Konflik	58
4.4	Kebutuhan terhadap Socioemotional Reconciliation	65
BAB V PEMBAHASAN Kesiapan Penyintas Ethnic Cleansing dan Pemerintah Serbia		
dalam Socioemotional Reconciliation Konflik Kosovo dan Serbia Tahun 2008-2016		67
5.1	Kosovo Women's Network sebagai Jejaring antar Penyintas	67
5.2	Kesiapan penyintas ethnic cleansing dan Pemerintah Serbia dalam	
Socioemotional Reconciliation		70
5.2.1	The Unilateral Alternative: Revenge and Social Distancing	72
5.2.2	The Interactive Alternative: The Needs-Based Model of the Apology- forgiveness Cycle	87
BAB VI PENUTUP		99
6.1	Kesimpulan	99
6.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		101
Sumber e-Book		101
Sumber e-Jurnal		101
Sumber Artikel dan Website		102

DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR

Tabel

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep <i>Socioemotional Reconciliation</i>	30
Tabel 2. Partisipasi perempuan dalam ICTY	74
Tabel 3. Partisipasi perempuan dalam misi – misi luar negeri	74
Tabel 4. Partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan	74

Bagan

Bagan 1. Alur Pemikiran	32
Bagan 2. <i>The Interactive Alternative: The Needs Based Model of Apology Forgiveness Cycle</i>	87

Gambar

Gambar 1. Angka Kematian Akibat Genosida	2
Gambar 2. Peta <i>claim</i> politik Kosovo	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena *ethnic cleansing* (pembersihan etnis) dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah etnis yang homogen dalam satu wilayah geografis. Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh PBB, kematian dan kerusakan infrastruktur bukan satu – satunya produk yang dihasilkan dari sebuah peperangan. Tapi konsekuensi lain juga harus diterima oleh warga sipil berupa pengusiran atau pemberantasan segmen populasi di wilayah tertentu dengan tujuan mempercepat penyerahan militer¹.

Dari data yang di miliki oleh PBB, *ethnic cleansing* belum diakui sebagai kejahatan di bawah hukum internasional². Namun, para ahli diberikan mandat untuk melihat ke dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di wilayah bekas pecahan Yugoslavia. Mereka mendefinisikan *ethnic cleansing* dalam laporannya sebagai sebuah strategi yang khusus dibuat oleh satu kelompok etnis atau agama untuk menghapus dengan kekerasan dan teror kepada penduduk sipil, etnis, atau agama dari daerah geografis tertentu³.

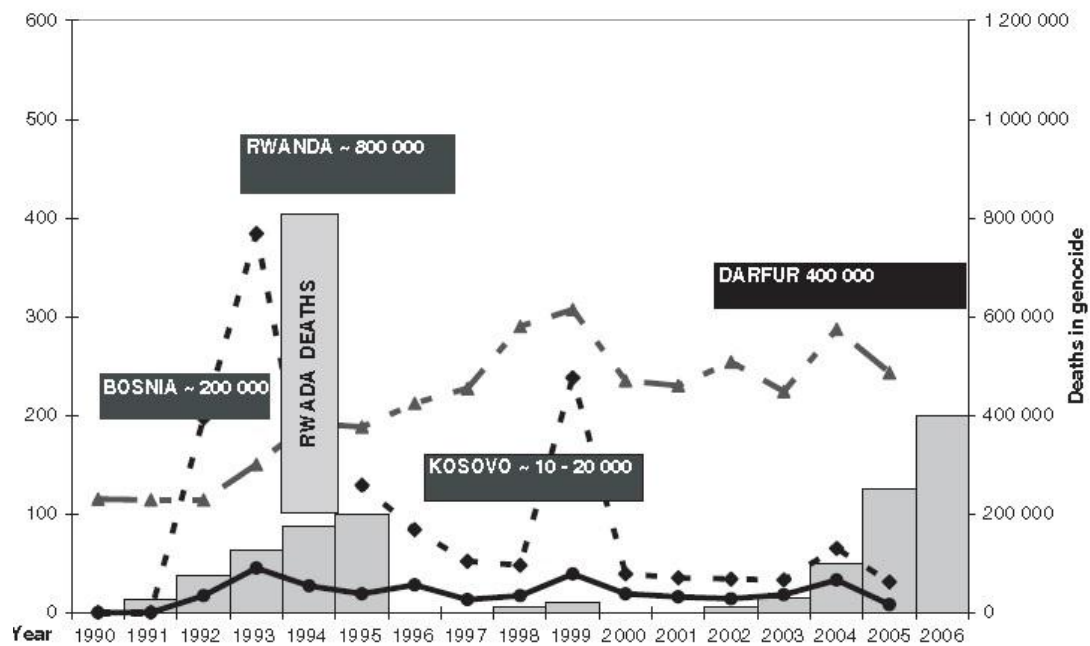
Praktik yang digunakan untuk menghapus penduduk sipil dapat meliputi; pembunuhan, penyiksaan, penahanan, pemerkosaan (*war rape*), penculikan, deportasi, penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia, perusakan dan

¹ George J. Andreopoulos. 2016. *Ethnic Cleansing: WAR CRIME*. Diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/ethnic-cleansing>. Pada 03 Maret 2017.

² United Nations: Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. *Ethnic Cleansing: Definition*. Diakses melalui <http://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.html>. Pada 03 Maret 2017.

³ *Ibid.*,

pengambilan kekayaan, serangan terhadap rumah sakit, dan tenaga medis. Dalam banyak praktik tersebut, perempuan lah yang menjadi sasaran utama, termasuk pemerkosaan (*war rape*) yang sifatnya sistematis. Hal ini dikarenakan perempuan di anggap sebagai “*operator*”⁴ faktor biologis dan budaya generasi berikutnya dari sebuah bangsa⁵.



Gambar 1.1 – Angka Kematian akibat Genosida

Penulis melihat terdapat empat tragedi etnis besar dalam kurun waktu 1990 – 2006 yang terjadi di Bosnia, Rwanda, Kosovo, dan Darfur. Dari keempat tragedi tersebut hanya dalam tragedi Kosovo, angka kematian tidak lebih dari 30.000 jiwa,

⁴ Perempuan menjadi *operator* atau dapat pula dimaknai sebagai *carriers* (pembawa) faktor biologis dan budaya generasi berikutnya karena pada saat konflik terjadi, para laki – laki yang berpartisipasi dalam peperangan akan meninggalkan keluarga dan komunitas. Membuat perempuan menjadi satu – satunya yang menggantikan peran melindungi dan merawat anak – anak. Absennya perlindungan terhadap para perempuan yang membuat mereka rentan menjadi target kejahatan perang. Dalam tulisan Ruth Seifert “*War and Rape. Analytical Approaches*” menjelaskan salah satu tujuan pemerkosaan selama konflik berlangsung adalah untuk menunjukkan bahwa peran laki – laki dalam melindungi perempuan di komunitasnya hanyalah mitos.

⁵ George J. Andreopoulos. 2016. *Op.cit.*,

sedangkan angka kematian dalam tiga tragedi lain mencapai lebih dari 100.000 jiwa⁶. Penulis berasumsi sedikitnya jumlah kematian yang terjadi di Kosovo menandakan tidak adanya indikasi untuk melakukan penghapusan etnis Albania di Kosovo melalui praktik pembantaian (*genocide*) seperti yang terjadi di Bosnia, Rwanda, dan Darfur. Namun, terdapat indikasi pengusiran populasi etnis Albania melalui praktik *ethnic cleansing*.

Sejauh ini penulis menemukan perbedaan antara genosida dan *ethnic cleansing*. Meskipun hasil akhir keduanya adalah menciptakan etnis yang homogen dalam suatu wilayah, namun maksud dan caranya berbeda. Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan khusus dengan maksud untuk menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari sebuah bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama⁷. Sedangkan *ethnic cleansing* adalah istilah baru yang digunakan untuk mendefinisikan upaya kekerasan, penyebaran ketakutan, atau intimidasi, dan teror untuk menyingkirkan orang – orang dari kelompok tertentu⁸. Seorang ahli dalam isu genosida, William Schabas menyatakan bahwa *ethnic cleansing* tidak bisa menjadi praktik genosida karena maksud dari *ethnic cleansing* adalah pengusiran populasi, berbeda dengan genosida yang bermaksud untuk menghancurkannya⁹.

Kemunculan fenomena *ethnic cleansing* sebagai konteks kejahatan perang pada tahun 90an salah satunya penulis temukan pada konflik bekas pecahan

⁶ Rony Blum, Gregory H. Stanton, Shira Sagi , etc. 2007. *Ethnic cleansing bleaches the atrocities of genocide*. hal. 2. Diakses melalui http://www.genocidewatch.org/images/By_Stanton_07_05_18_Ethnic_cleansing_bleaches_the_atrocities_of_genocide.pdf. Pada 01 Mei 2017.

⁷ Manashaw. 2004. *Genocide And Ethnic Cleansing: Why the Distinction? A Discuccion in the CONTEXT OF Atrocities Occuring in Sudan*. hal. 11. Diakses melalui <http://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1168&context=cwilj>. Pada 01 Mei 2017.

⁸ *Ibid.*, hal. 12.

⁹ *Op.,cit*

Yugoslavia antara Kosovo dan Serbia, yang melibatkan Pemerintah Serbia dan etnis Albania yang ada di Kosovo¹⁰. Konflik yang di latar belakang oleh keinginan Kosovo untuk memisahkan diri dari wilayah Serbia disambut pertentangan oleh Presiden Serbia, Slobodan Milosevic¹¹. Kampanye *ethnic cleansing* gencar dilakukan oleh Slobodan Milosevic menyusul adanya permintaan pemisahan diri Kosovo dari Serbia¹². Lebih dari 700.000 etnis Albania yang tinggal di Kosovo menjadi korban dari konflik tersebut¹³.

Pengusiran dan penanggalan paksa dokumen identitas diri tercatat dalam periode tahun 1998 – 1999 yang terjadi selama konflik terbuka antara NATO, pasukan keamanan Serbia, dan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA)¹⁴. Namun, pemerkosaan masih menjadi kata kunci dari kampanye *ethnic cleansing* dengan target perempuan dan anak – anak yang dilakukan oleh polisi Serbia dan militer Yugoslavia. Umumnya, pemerkosaan tersebut dilakukan dengan tiga motif yaitu; pertama, menyebarkan intimidasi dan ketakutan. Kedua menargetkan korban individual yang membantu KLA seperti elit politik, aktivis HAM, tenaga medis dan pengusaha. Dan yang terakhir, adalah untuk membalas dendam atas perlawanan etnis Albania¹⁵.

Angka pemerkosaan cenderung lebih tinggi terjadi di Kosovo. Dari laporan *Human Rights Watch*; “*Rape as a weapon of ethnic cleansing*” mengantarkan

¹⁰ United Nations: Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. *Ethnic Cleansing: Background*. Diakses melalui <http://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.html>. Pada 04 Maret 2017.

¹¹ Michael Lund. *Kosovo: Chronology*. hal 4-7. Diakses melalui <http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/database/Kosovo/kosovo.pdf>. Pada 04 Maret 2017.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, hal. 9

¹⁴ Human Rights Watch. 2001. *UNDER ORDERS: War Crimes in Kosovo*. hal 3-5. Diakses melalui https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Under_Orders_En_Combined.pdf. Pada 04 Maret 2017.

¹⁵ *Ibid.*,

penulis pada sejumlah statistik berisikan data korban pemerkosaan selama konflik etnis terjadi¹⁶. *Nobel Women's Initiative* juga merilis data, setidaknya ada 9.300 kasus pemerkosaan terjadi di Darfur, dan 15.000 – 40.000 kasus di Bosnia¹⁷, Rwanda 2.000 – 5.000 kasus¹⁸, dan Kosovo 23.000 – 45.000¹⁹.

Selama ini, tidak ada prediksi angka yang benar – benar akurat dalam menunjukkan seberapa banyak perempuan dan anak - anak yang menjadi korban pemerkosaan²⁰. Selain terbentur dengan nilai – nilai yang dianggap tabu, sulit untuk membawa kasus pemerkosaan ke pengadilan karena membutuhkan bukti yang cukup. Sedangkan bukti medis sulit didapatkan pada saat masa perang akibat penghancuran fasilitas kesehatan²¹. Fakta lain, pemerkosaan diibaratkan sebagai dua mata pedang yang menjadi penyebab dan konsekuensi terhadap minimnya partisipasi perempuan dalam hampir setiap level proses pembuatan kebijakan²².

Dari aspek etnis, para korban / perempuan selamat, kemudian penulis sebut sebagai penyintas, yang memiliki anak dari tragedi *ethnic cleansing* akan mengalami masalah identitas. Anak – anak yang lahir dari tragedi 1998 – 1999 akan sulit diidentifikasi sebagai etnis Albania atau etnis Serbia, pengakuan sebagai korban

¹⁶ Human Rights Watch. 2000. *Serb Gang-Rapes in Kosovo Exposed*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2000/03/20/serb-gang-rapes-kosovo-exposed>. Pada 18 Mei 2017.

¹⁷ Nobel Women's Initiative. 2011. *War on Women: Time for Action to End Sexual Violence in Conflict*. hal 6 – 10. Diakses melalui <http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2013/09/war-on-women-web.pdf>. Pada 18 Mei 2017.

¹⁸ Human Rights Watch. 1996. *Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/reports/1996/Rwanda.htm>. Pada 18 Mei 2017.

¹⁹ Jeanne Ward dan Mendy Marsh. 2006. *Sexual Violence Against Women and Girls in War and Its Aftermath: Realities, Responses, and Required Resources*. hal 2. Diakses melalui <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CCEF504C15AB277E852571AB0071F7CE-UNFPA.pdf>. Pada 18 Mei 2017.

²⁰ Hsin-Yu Wang. 2015. *Kosovo Field Trip Report*. Diakses melalui http://www.postgraduatecenter.at/fileadmin/user_upload/pgc/1_Weiterbildungsprogramme/Human_Rights/Downloads/Student_reflection_kosovo/2015_Kosovo_Cynthia_Wang.pdf. Pada 18 Mei 2017.

²¹ *Ibid.*,

²² Nobel Women's Initiative. *Op.cit*

perang saja baru didapatkan oleh penyintas pada tahun 2014²³. Mekanisme pengakuan anak – anak tragedi *ethnic cleansing* pun belum terbentuk dengan baik. Hal tersebut kemudian membawa stigma sosial yang buruk bagi para penyintas²⁴.

Belum selesai perkara menjadi korban *ethnic cleansing*, mereka harus dijatuhi stigma yang membebani hidupnya. Stigma datang bersamaan dengan diskriminasi terhadap mereka yang ingin berpendidikan, memperoleh pekerjaan, dan ingin mendapat pelayanan kesehatan²⁵. Akibatnya mereka tidak mendapat pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan yang layak. Skenario lain yang lebih buruk adalah absennya pemerintah dalam menjamin kompensasi keamanan untuk para penyintas.

Menanggung stigma buruk membuat para penyintas meminta kepada pemerintah untuk dirahasiakan keberadaannya, mereka ingin mendapat status *anonymous*²⁶. Tentu saja permintaan tersebut sekaligus menandakan bahwa tidak ada partisipasi politik bagi seseorang yang bahkan statusnya ingin disembunyikan²⁷. Satu – satunya jalan bagi penyintas adalah memiliki representatif di parlemen Kosovo yang akan membantu memenuhi kebutuhan mereka²⁸.

Berbicara mengenai perempuan dan haknya sebagai korban peperangan, hal tersebut kiranya sejalan dengan apa yang terjadi di Kosovo. Para perempuan di Kosovo terlibat dalam upaya penuntutan hak yang dilakukan sebagai bentuk protes

²³ UN Women. 2016. *Technical Report: The Conflict Did Not Bring Us Flowers*. hal. 12. Diakses dalam http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/the-conflict-did-not-bring-us-flowers_eng.pdf?vs=5055. Pada 01 Mei 2017.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, hal. 7

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

atas permasalahan para penyintas yang berlangsung akibat adanya *ethnic cleansing* pada tahun 1998 – 1999²⁹. Melalui perantara beberapa lembaga, orang – orang Albania terutama perempuan Albania di Kosovo bersatu untuk mencari keadilan yang sebenar – benarnya atas konflik yang terjadi pada saat itu³⁰.

Sebuah penelitian yang tercantum dalam tulisan Arie Nadler dan Nurit Shnabel menjelaskan tentang standar untuk memutuskan pihak mana yang benar dan salah berdasarkan siapa yang dianggap sebagai kelompok korban³¹. Dari penelitian tersebut, maka dapat penulis tarik sebuah pernyataan bahwa, dengan menghubungkan emosi satu sama lain sebagai korban, akan lebih mudah menganalisa kondisi korban perang sebagai sebuah kelompok daripada melihat mereka sebagai individu. Kemudian, berangkat dari hal tersebut penulis merepresentasikan sebuah jejaring, yaitu *Kosovo Women's Network* yang mewakili kepentingan perempuan Albania sebagai penyintas *ethnic cleansing* sebagai kelompok korban yang menghimpun dirinya untuk mendapat pengakuan dan keadilan.

Kosovo Women's Network membawa kepentingan organisasi perempuan dari semua kelompok etnis, baik dari Kosovo dan sebagian Serbia. Bekerjasama secara sistematis dengan kelompok perempuan lainnya di wilayah – wilayah tersebut untuk memperbarui kenginan dalam menjalin komunikasi dengan Serbia. Mereka memiliki

²⁹ Women's International League For Peace and Freedom. 2012. *Support the Kosovo Women's Network*. Diakses dalam <http://wilpf.org/support-the-kosovo-womens-network/>. Pada 01 April 2017.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Anca M. Miron dan Nyla R. Branscombe dalam Arie Nadler, Thomas E. Malloy, Jeffrey D. Fisher. 2008. *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. Diakses dalam http://libgen.io/get/08F146E451E114B32CD4F4820BE3B3BA/Arie%20Nadler%2C%20Thomas%20Malloy%20and%20Jeffrey%20D.%20Fisher%20%28eds.%29-Social%20Psychology%20of%20Intergroup%20Reconciliation_%20From%20Violent%20Conflict%20to%20Peaceful%20Co-Existence-Oxford%20University%20Press%2C%20USA%20%282008%29.pdf. hal. 77. Pada 1 Oktober 2017.

misi untuk mendukung, melindungi, dan mempromosikan hak – hak dan kepentingan perempuan dan anak perempuan di seluruh Kosovo³².

Hadirnya konflik yang tergolong kedalam *inter – state war* ini kemudian memberikan banyak kerugian kepada warga sipil karena *combatant* seringkali menargetkan *non – combatant* sebagai tujuan strategisnya³³. Mengabaikan norma – norma kemanusiaan mengenai aturan perang sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga fenomena *ethnic cleansing* mendapat sorotan dan kritikan dari dunia internasional. Salah satunya dari badan dunia, *United Nations* (PBB) yang melalui resolusi tahun 1993 mengatakan;

*“Condemns also the specific violations identified by the Special Rapporteur, most of which are committed in connection with ethnic cleansing by Bosnian Serbs, and which include killings, torture, beatings, arbitrary searches, rape, disappearances, destruction of houses, forced and illegal evictions, detentions and other acts or threats of violence aimed at forcing individuals to leave their homes.”*³⁴

Dengan pernyataan tersebut, mempertegas bahwa praktik *ethnic cleansing* yang menargetkan *non – combatant* yang dilakukan oleh Serbia, dianggap sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Melalui resolusi 1674 tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, Dewan Keamanan PBB kemudian menawarkan tindakan kolektif bagi dunia internasional untuk mengatasi fenomena genosida,

³² Kosovo Women’s Network. 2017. *Support Women’s Right*. Diakses dalam <http://www.womensnetwork.org/?FaqlD=22>. Pada 01 April 2017.

³³ *Armed Conflict: The Impact of Armed Conflict on Society*. Ch. XV. hal. 205. Diakses melalui www.un.org/esa/socdev/rwss/.../15%20Armed%20Conflict.pdf. Pada 04 Maret 2017.

³⁴ International Committee of Red Cross. *Practice Relating to Rule 129. The Act of Displacement: Section C. Ethnic cleansing*. Diakses melalui https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter38_rule129_sectionc. Pada 04 Maret 2017.

ethnic cleansing, dan kejahatan kemanusiaan lain dengan mengadopsi apa yang disebut *Responsibility to Protect* (RtoP)³⁵.

Selain mengajak tindakan kolektif dari dunia internasional, PBB juga secara spesifik memberikan mandat khusus. Melalui resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB pada tahun 1999 secara resmi mendirikan *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Pendirian UNMIK ditujukan untuk membentuk pemerintahan sementara bagi Kosovo, dimana warga sipil mendapatkan perlindungan dibawah PBB³⁶. Selain itu, pendirian UNMIK juga dimaksudkan untuk mendukung proses perdamaian di Kosovo. Wewenang yang diberikan kepada UNMIK, kemudian menjadi perwujudan dari terminologi *An Agenda for Peace* yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal PBB tahun 1992, Bhoutros Bhoutros Ghali³⁷. Agenda tersebut berisikan tiga pilar pembentukan perdamaian meliputi *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* yang akan menjadi aktivitas utama bagi UNMIK di Kosovo.

Sampai saat penelitian ini dibuat pada 2017, hubungan orang – orang dari etnis Albania dan Serbia di Kosovo tidak bisa dikatakan baik³⁸. Survei yang dilakukan salah satu lembaga asal Jerman dan AIIS di Kosovo, orang – orang Albania percaya bahwa pemerintah memiliki hubungan yang lebih baik daripada masyarakatnya³⁹. Salah satu rilis opini publik dari Rina Cakrani, seorang Albania

³⁵ Christoph Mikulaschek. *The United Nations Security Council and The Responsibility to Protect: Policy, Process, and Practice*. hal. 20. Diakses melalui <http://responsibilitytoprotect.org/mikulaschek.pdf>. Pada 04 Maret 2017.

³⁶ United Nations Mission in Kosovo. *Mandate*. Diakses dalam <https://unmik.unmissions.org/mandate>. Pada 04 Maret 2017.

³⁷ United Nations Secretary – General. 1992. *An Agenda for Peace*. Sesi 47. Diakses dalam <http://www.un-documents.net/a47-277.htm>. Pada 05 Maret 2017.

³⁸ Fatjona Mejdini. 2015. *Albanians Feel Reserved About Serbs, Poll Shows*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/albanians-still-reserved-toward-serbians-poll-shows-10-28-2015>. Pada 15 Juni 2017.

³⁹ *Ibid.*,

juga menuturkan bahwa orang – orang Albania telah dan masih berpikir bahwa orang – orang Serbia adalah orang jahat atas apa yang mereka lakukan terhadap etnis Albania⁴⁰.

Berdasarkan laporan dari PBB mengenai mandat perdamaian yang dilakukan oleh UNMIK⁴¹, penulis menilai sudah banyak upaya yang dilakukan dalam rangka resolusi konflik. Dari mulai fungsi *peacebuilding* yang dijalankan oleh UNMIK berupa DDR (*disarmament, demobilization, reintegration*) sampai upaya SSR (*security sector reform*)⁴². Namun, Kosovo harus berupaya lebih dari itu untuk bisa mewujudkan cita – cita *positive peace*⁴³ yang diutarakan oleh Johan Galtung⁴⁴. Penulis melihat bahwa penting bagi Kosovo dan Serbia untuk melangkah ke tahap lebih jauh dari resolusi konflik, yaitu dengan menginisiasi sebuah rekonsiliasi.

Melalui tulisannya, David J. Whittaker menyatakan, pemahaman tentang rekonsiliasi telah melampaui pemahaman tentang resolusi konflik⁴⁵. Pemahaman tersebut kemudian tidak selalu merujuk pada *politic arrangement* untuk menyelesaikan sebuah permusuhan dan perbedaan. Namun, juga merujuk pada *psychological process* dimana terdapat upaya pemahaman dan toleransi yang

⁴⁰ Rina Cakrani. 2015. *Albania – Serbia Relationship*. Diakses dalam <http://politicsmadepublic.com/albania-serbia-relationship/>. Pada 15 Juni 2017.

⁴¹ United Nations Mission in Kosovo. 2017. *Mandate*. Diakses dalam <https://unmik.unmissions.org/mandate>. Pada 13 Juni 2017.

⁴² United Nations Secretary – General. 1992. *An Agenda for Peace*. Sesi 47. Diakses dalam <http://www.un-documents.net/a47-277.htm>. Pada 13 Juni 2017.

⁴³ Sebuah pemulihan hubungan yang bertujuan untuk menciptakan sistem sosial yang melayani kebutuhan seluruh penduduk dan penyelesaian konflik yang bersifat konstruktif. Perdamaian tidak berarti tidak ada konflik sama sekali, namun lebih ke tidak adanya kekerasan dalam bentuk apapun dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Perdamaian hadir dimana orang berinteraksi tanpa kekerasan dan mengelola konflik mereka secara positif.

⁴⁴ Claske Dijkema. 2007. *Negative Versus Positive Peace*. Diakses dalam http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-186_en.html. Pada 13 Juni 2017.

⁴⁵ David J. Whittaker. 2002. *Conflict and Reconciliation in the Contemporary World*. hal. 1. Pada 28 Mei 2017.

mengarah pada kesiapan kedua pihak berkonflik untuk hidup bersama atau bisa disebut dengan *willingness to reconcile*.

Kebutuhan terhadap sebuah rekonsiliasi tidak tanpa alasan. Realitas hubungan etnis Albania dan etnis Serbia di Kosovo yang telah penulis sampaikan menunjukkan dengan jelas bahwa perdamaian hanya tercipta pada level negara saja, belum menyeluruh sampai pada warga negara didalamnya. Inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi sebenarnya menjadi sebuah hal yang sulit untuk didefinisikan karena sifatnya yang abstrak. Bila bisa diartikan, rekonsiliasi adalah tentang memaafkan seseorang yang telah menyakiti atau meminta maaf pada orang yang telah disakiti⁴⁶.

Sederhananya, rekonsiliasi terkait perihal memaafkan dan dimaafkan, namun penerapan rekonsiliasi tidak sesederhana pendefinisian. Permasalahannya adalah tidak mudah bagi kedua pihak yang saling mengenal satu sama lain sebagai musuh untuk meminta maaf dan memaafkan. Konflik etnis tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai konflik yang terjadi karena perebutan wilayah, perbedaan pandangan, atau kepentingan⁴⁷. Konflik etnis lebih disebabkan oleh *collective fears of the future*, sebuah ketakutan untuk hidup di masa yang akan datang dengan membawa luka dari masa lalu⁴⁸. Kondisi itulah yang saat ini terjadi di Kosovo dimana melibatkan para penyintas khususnya perempuan etnis Albania dan Serbia. Oleh karena itu, konsep *Socioemotional Reconciliation* yang penulis pakai menjadi sebuah kerangka pikir yang menawarkan solusi untuk terlebih dahulu menyelesaikan

⁴⁶ Arie Nadler. 2012. *Intergroup Reconciliation: Definitions, Processes, and Future Directions*. hal 293.

Diakses dalam

https://www.researchgate.net/profile/Arie_Nadler/publication/288545402_Intergroup_Reconciliation_Definitions_Processes_and_Future_Directions/links/56f4febe08ae7c1fda2d8e0b/Intergroup-Reconciliation-Definitions-Processes-and-Future-Directions.pdf?origin=publication_detail. Pada 16 Juni 2017.

⁴⁷ David A. Lake dan Donald Rotchild. 2008. *Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict*. hal. 41 – 42. Diakses dalam <http://users.metu.edu.tr/utuba/Lake.pdf>. Pada 01 Mei 2017.

⁴⁸ *Ibid.*,

permasalahan di masa lalu, kemudian membentuk kembali dua komunitas yang terpisah⁴⁹.

Sejalan dengan hal tersebut, tahapan rekonsiliasi yang dijelaskan oleh David Bloomfield⁵⁰, dan konseptualisasi *Political Reconciliation* oleh Colleen Murphy⁵¹ turut memperkaya pemahaman penulis bahwa; bagaimanapun model rekonsiliasi yang dipakai, sebelum berhasil untuk saling memaafkan, terdapat upaya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di masa lalu. Konsep *Socioemotional Reconciliation* memiliki pendekatan dalam perkara *dealing with the past* yang berusaha mengembalikan perasaan korban yang masih menyimpan luka⁵².

Untuk meresolusi konflik bersenjata, DDR dan SSR mungkin akan cukup membantu dalam prosesnya. Namun, jika menyangkut hal yang tidak terlihat seperti dendam, emosi, dan rasa takut akan membutuhkan alat lain yang bisa untuk menyelesaikannya. Disinilah alasan mengapa penulis menggunakan kerangka pikir *Socioemotional Reconciliation* untuk menjelaskan penelitian tentang konflik etnis antara Kosovo dan Serbia. Selain itu, pemimpin politik, komunitas, agama, dan NGO harus berperan aktif dalam melakukan persiapan yang diistilahkan sebagai *maintenance of personal relationship*⁵³.

⁴⁹ Arie Nadler, Thomas E. Malloy, Jeffrey D. Fisher. 2008. *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. Diakses dalam http://libgen.io/get/08F146E451E114B32CD4F4820BE3B3BA/Arie%20Nadler%2C%20Thomas%20Malloy%20and%20Jeffrey%20D.%20Fisher%20%28eds.%29-Social%20Psychology%20of%20Intergroup%20Reconciliation_%20From%20Violent%20Conflict%20to%20Peaceful%20Co-Existence-Oxford%20University%20Press%2C%20USA%20%282008%29.pdf. Pada 18 April 2017.

⁵⁰ David Bloomfield, Teresa Barnes, dan Luc Huyse. 2003. *Reconciliation After Violent Conflict; A Handbook*. hal. 19 – 21. Pada 28 Mei 2017.

⁵¹ Colleen Murphy. 2010. *A Moral Theory of Political Reconciliation*. hal 8 – 16. Pada 28 Mei 2017.

⁵² Arie Nadler, Thomas E. Malloy, Jeffrey D. Fisher. *Op.,cit*

⁵³ *Ibid.*, hal. 13 – 16.

Mengenai periode penelitian, tahun 2008 dipilih oleh penulis karena merupakan periode dimana Kosovo mendapatkan kemerdekaannya sekaligus menjadi awal periode pasca transisi kepemimpinan Slobodan Milosevic. Sedangkan tahun 2016 adalah periode terbaru yang bisa penulis ambil untuk melihat kesiapan para penyintas dan Pemerintah Serbia untuk siap melakukan rekonsiliasi.

Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation* Konflik Kosovo dan Serbia Tahun 2008 – 2016.**” Dengan fokus penelitian melihat kesiapan para penyintas dan Pemerintah Serbia dalam melanjutkan kehidupannya seperti sebelum konflik terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang menjelaskan mengenai *ethnic cleansing*, para penyintas dan konflik etnis Albania dengan Pemerintah Serbia, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah; **Bagaimana kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation* konflik Kosovo dan Serbia tahun 2008 – 2016?**

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan bagaimana kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam merekonsiliasi hubungan menggunakan kerangka pikir *Socioemotional Reconciliation*.

Menjelaskan kebutuhan terhadap rekonsiliasi antara Kosovo dan Serbia terutama etnis Albania dan etnis Serbia yang hidup didalamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru khususnya dalam bidang ilmu hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dengan kasus dan fenomena yang sama.

1.4.2 Praktis

Dalam bidang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai para penyintas akibat *ethnic cleansing* secara global. Dan juga memberikan informasi tentang pandangan baru mengenai perempuan dalam perdamaian.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam sub bab ini, penulis akan memaparkan tinjauan penulis atas beberapa penelitian dan kajian ilmiah terdahulu, serta beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, studi terdahulu yang penulis gunakan adalah tesis yang ditulis oleh Juri Grudina yang berjudul “*Briding Separated Communities With the Use of Common Instrumental Goals*” menjelaskan mengenai hubungan antar etnik Serbia dan Albania melalui konsep *Instrumental Reconciliation*. Sedangkan studi terdahulu kedua, penulis ambil dari *thesis* milik Sanne Dobber yang berjudul “*Reconciliation Initiatives in Kosovo: A Political Psychological Analysis*” dengan mengusung *Psychological Theory* untuk melihat inisiatif rekonsiliasi di Kosovo. Dari kedua studi terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dan kesamaan pandangan dalam melihat kasus penelitian.

Penelitian ini menggunakan konsep dari Arie Nadler dan Nurit Shnabel mengenai *Instrumental Reconciliation* dan *Socioemotional Reconciliation*. Dalam hal ini, peneliti hanya menggunakan konsep *Socioemotional Reconciliation* yang merupakan pendekatan dalam pengembalian *mutual trust* para warga sipil yang masih menyimpan luka dari tragedi masa lalu. Dimana pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dari fenomena penyintas *ethnic cleansing*.

Dalam sub bab definisi konseptual, penulis akan mengoperasionisasikan konsep dalam mengatasi fenomena penyintas *ethnic cleansing*. Operasionalisasi yang penulis lakukan menggunakan indikator – indikator konsep *Socioemotional Reconciliation* yang akan dianalisa secara sistematis. Penulis juga akan memaparkan secara singkat penelitian ini melalui sebuah alur pemikiran yang

berangkat dari judul, rumusan masalah, hingga operasionalisasi konsep, Alur pemikiran tersebut dapat menjadi dasar dari argumen utama penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2.1 Studi Terdahulu

Thesis dari Juri Grudina yang berjudul “*Bridging Separated Communities With the Use of Common Instrumental Goals*” pada tahun 2012 menjadi studi terdahulu pertama yang akan penulis jelaskan. Pada penelitian tersebut, Grudina melakukan sebuah penelitian selama beberapa bulan di Kota Pristina, Kosovo mengenai sebuah *common goal* yang memungkinkan mendorong rekonsiliasi antara etnis Albania dan Serbia di Kosovo. Melalui penelitiannya, Grudina ingin melihat dinamika hubungan antar etnis sebelum, pada saat, dan setelah perang. Grudina juga ingin melihat apa yang menjadi penghalang bagi kedua etnis untuk bisa saling bekerjasama.

Dalam *thesis* tersebut Grudina berusaha menjelaskan secara sistematis komparasi dan analisa teori yang digunakan untuk penelitiannya. Fokus penelitiannya adalah bagaimana kerjasama, rasa percaya, dan sebuah hubungan dapat mempengaruhi proses perdamaian. Sebelum mulai dengan penelitiannya, Grudina memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai peran dari emosi dalam sebuah *intractable conflict* yang digambarkan dalam konflik Kosovo. Selain itu, *thesis* ini juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan konsep *Instrumental Reconciliation* dan *Socio – emotional Reconciliation* yang dikutip dalam tulisan Nadler dan Shnabel.

Terlepas dari sebuah konflik yang didorong oleh keserakahan, ketamakan, atau perbedaan budaya dan religi, *intractable conflict* memiliki suatu kesamaan,

yaitu melahirkan sebuah emosi¹. Emosi menjadi bagian dari permasalahan yang membuat orang saling terpisah, namun bisa pula menjadi bagian dari solusi ketika dipertimbangkan dengan matang dalam proses perdamaian². Permasalahannya bukan terletak pada emosi yang dirasakan oleh seseorang, namun emosi tersebut terhubung satu sama lain dalam *collective experiences*³. Emosi bisa dikatakan menguat ketika saling terhubung dan terikat dengan pengalaman buruk, pengalaman buruk akan menciptakan emosi buruk sehingga terkadang seseorang akan lebih mudah mengingatnya daripada melupakannya⁴. Oleh karena itu terkadang rekonsiliasi menjadi hal yang rumit karena menyangkut emosi.

Nadler dan Shnabel dalam tulisan Grudina mendefinisikan rekonsiliasi sebagai sebuah proses untuk menyingkirkan konflik yang terhalang oleh emosi yang memperlambat penyembuhan dan pengembalian hubungan kembali baik⁵. Teori rekonsiliasi yang mereka cetuskan berasal dari pendekatan *psychological needs* dalam sebuah konflik. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa sebuah perdamaian baru bisa di capai hanya jika *psychological needs* dari kelompok yang berkonflik dapat dipenuhi⁶.

Sederhananya, *psychological needs* membicarakan kebutuhan untuk diberdayakan dan kebutuhan untuk diterima⁷. Pemberdayaan menjadi hal krusial bagi para korban karena mereka sangat ingin mendapatkan kembali kontrol atas

¹ Juri Grudina. 2012. *Bridging Separated Communities With the Use of Common Instrumental Goals*. hal. 26. Diakses dari <http://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/2878/2012%20Grudina.pdf?sequence=1>. Pada 13 April 2017.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*, hal. 27

⁵ *Ibid.*, hal. 32

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

hidupnya dan dengan begitu mereka ingin pula diperlakukan sama dan adil. Hal tersebut bisa diwujudkan hanya jika pelaku mau mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Disisi lain, kebutuhan bagi para pelaku adalah untuk bisa di terima secara moral dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

Terpenuhinya *psychological needs* menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan *Socio – emotional Reconciliation*, namun berbeda dengan *Instrumental Reconciliation*. Fokus terhadap masa lalu dan *apology – forgiveness cycle* adalah aspek – aspek dalam *Socio – emotional Reconciliation*, sedangkan pencapaian dari konsep *Instrumental Reconciliation* adalah proses dimana pihak yang berkonflik belajar untuk bekerja sama dalam mencapai *common goal* antar kedua belah pihak⁸.

Mencapai sebuah kepercayaan adalah tujuan utama dari konsep *Instrumental Reconciliation*. Borris dan Diehl dalam tulisan Grudina juga menyatakan bahwa kepercayaan menjadi sebuah esensi untuk menyelesaikan konflik dan membawa perubahan dari hubungan permusuhan menjadi hubungan damai⁹. Kesimpulannya, perbedaan utama dari kedua konsep rekonsiliasi dari *thesis* ini adalah; *Socio – emotional Reconciliation* berfokus pada kejadian masa lalu dan *apology – forgiveness cycle*, sedangkan *Instrumental Reconciliation* fokus terhadap *step-by-step* dan pelajaran yang didapat kedua pihak yang konflik untuk bisa bekerjasama mencapai *common goal* dalam mewujudkan perdamaian.

Studi terdahulu berikutnya penulis ambil dari *thesis* Sanne Dobber yang berjudul “*Reconciliation Initiative in Kosovo: A Political Psychological*

⁸ *Ibid.*, hal. 33

⁹ *Ibid.*,

Analysis”¹⁰. Dalam *thesis*nya, Dobber menjelaskan bahwa *Kumanovo Agreement* sebagai deklarasi berakhirnya konflik di Kosovo tidak menyelesaikan permasalahan yang menyangkut etnis Albania dan Serbia¹¹. *Kumanovo Agreement* juga tidak merubah kualitas hubungan antar kedua etnis, bahkan pada tahun 2004, kekerasan kembali terjadi di Mitrovica dan menjalar ke seluruh bagian Kosovo¹².

Pendekatan tradisional yang digunakan selama ini hanya fokus pada hukuman lewat lembaga peradilan bagi pelaku individual. Dalam kasus Kosovo, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) yang diberikan mandat untuk melakukan penghakiman bagi para pelaku *ethnic cleansing*¹³. Berharap bisa merubah hubungan antar kedua etnis, justru konflik tersebut menjadi berkepanjangan, masing – masing etnis hidup saling berjauhan dengan sistem pendidikan, kesehatan, dan administrasi yang berbeda¹⁴.

Melalui *thesis* nya, Dobber menggunakan *Psychological Mechanisms* dalam membentuk ulang hubungan antar *rival* yang terjadi di Kosovo melalui rekonsiliasi¹⁵. Pendekatan tersebut memiliki dua cara yang berbeda dalam sebuah rekonsiliasi. Pertama, fokus pada menstabilkan hubungan antar etnis dengan saling berbagi minat seperti olahraga dan musik. Dengan begitu seseorang akan memiliki alasan untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan orang dari etnis lain.

¹⁰ Sanne Dobber. 2013. *Reconciliation Initiative in Kosovo: A Political Psychological Analysis*. Diakses dari <http://scriptiesonline.uba.uva.nl/document/517156>. Pada 13 April 2017.

¹¹ *Ibid.*, hal. 6

¹² *Ibid.*, hal. 7

¹³ *Ibid.*, hal. 34

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, hal. 35

Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu penerimaan masa lalu dengan harapan mampu menciptakan masa depan tanpa kekerasan¹⁶.

Meskipun Dobber menyadari bahwa *re-establish relationship* dan *dealing with the past* merupakan kedua hal yang berbeda, namun dua bagian rekonsiliasi tersebut bisa dicapai bersamaan¹⁷. Sebagai contoh, bagi seseorang, menerima masa lalu menjadi sebuah aktivitas yang akan melibatkan interaksi antar etnis. Dengan begitu, sembari menerima kenyataan akan masa lalu, secara natural hubungan antar keduanya juga akan membaik. Begitulah argumen dari *Psychological Mechanisms* yang dijelaskan dalam *thesis* milik Sanne Dobber.

Psychological Mechanisms tidak hanya berdasarkan dari argumen tersebut. Dobber juga menyertakan beberapa *tools* untuk mendukung terlaksananya *Psychological Mechanisms*¹⁸, yaitu dengan; *Intergroup Contact*, *Extended Intergroup Contact*, *The Development of Trust*, *Humanization of the Other*, *Taking the Perspective of the Other*, dan *Creating Common Identity*. Beberapa kombinasi dari *tools* tersebut diyakini Dobber bisa menciptakan rekonsiliasi yang efektif bagi etnis Albania dan Serbia di Kosovo.

2.2 Definisi Konseptual

2.2.1 Socioemotional Reconciliation

Selanjutnya, yang akan penulis jelaskan dalam sub bab ini penulis ambil dari dua buku, yaitu milik John Paul Lederach yang berjudul “*Building*

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, hal. 36

¹⁸ *Ibid.*, hal. 36 – 46

Peace: Sustainable Reconciliation in Divide Societies”¹⁹, dan Arie Nadler dan Nurit Shnabel tentang *Socioemotional Reconciliation* dalam buku yang berjudul “*The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*”²⁰.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lederach, sebuah kelompok yang berkonflik biasanya hidup didalam kedekatan geografis²¹. Mereka mengalami pengalaman tentang trauma kekerasan yang diasosiasikan dengan yang disebut musuh. Dan terkadang, trauma tersebut terikat dalam sejarah yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Sebuah paradox yang kemudian muncul adalah, mereka selama ini hidup bertetangga dan terkunci dalam lingkaran permusuhan²².

Sebelum mendefinisikan rekonsiliasi, pertama – tama kita harus mendefinisikan empat konsep mendasar yaitu; *Truth*, *Mercy*, *Justice*, dan *Peace*²³. Dalam *Truth*, terdapat sebuah kejujuran, membuka rahasia, kejelasan, dan pertanggung jawaban. Saling melihat sebagai apa adanya, dan tanpa *Truth* dalam diri seseorang, maka konflik tidak akan terpecahkan. Dalam *Mercy*, terdapat perasaan, pengampunan, rasa terima, dan sebagai awalan yang baru. Tanpa adanya *Mercy* dalam diri seseorang, hubungan yang

¹⁹ John Paul Lederach. 1999. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divide Societies*. Diakses dari [http://dlx.bookzz.org/genesis/840000/286ba119277fb02b6161cddb75524c22/_as/%5BJohn_Paul_Lederach%5D_Building_Peace_Sustainable_R\(BookZZ.org\).pdf](http://dlx.bookzz.org/genesis/840000/286ba119277fb02b6161cddb75524c22/_as/%5BJohn_Paul_Lederach%5D_Building_Peace_Sustainable_R(BookZZ.org).pdf). Pada 05 April 2017.

²⁰ Arie Nadler, Thomas E. Malloy, Jeffrey D. Fisher. 2008. *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. Diakses dalam http://libgen.io/get/08F146E451E114B32CD4F4820BE3B3BA/Arie%20Nadler%2C%20Thomas%20Malloy%20and%20Jeffrey%20D.%20Fisher%20%28eds.%29-Social%20Psychology%20of%20Intergroup%20Reconciliation_%20From%20Violent%20Conflict%20to%20Peaceful%20Co-Existence-Oxford%20University%20Press%2C%20USA%20%282008%29.pdf. Pada 18 April 2017.

²¹ *Ibid.*, hal. 23

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hal. 28

sehat tidak bisa diwujudkan. Dalam *Justice*, terdapat upaya untuk meluruskan apa yang salah. Sedangkan dalam *Peace*, terdapat harmoni, kesatuan, dan kesejahteraan²⁴.

Lalu, tempat apa yang kemudian bisa kita sebut dimana *Truth*, *Mercy*, *Justice*, dan *Peace* bertemu dalam satu tempat? Lederach menjelaskan dalam bukunya bahwa bertemunya empat konsep dalam satu tempat dinamakan rekonsiliasi²⁵. Jadi bisa disimpulkan bahwa, rekonsiliasi berisikan keinginan untuk tidak berselisih siapa yang benar dan salah pada masa lalu, dan siapa yang lebih pintar menerima di masa depan, lebih dari itu, rekonsiliasi berisikan keinginan untuk melihat apa yang bisa dilakukan bersama di masa depan.

Para peneliti dan akademisi melihat bahwa untuk mengakhiri sebuah konflik, terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan. *Pertama*, pendekatan *realist* yang mengatakan bahwa konflik adalah hal yang sudah melekat dari proses kompetisi antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, biasanya dalam bentuk wilayah²⁶. *Kedua*, pendekatan *psychological needs* yang berusaha melampaui *realist* dengan melihat lebih dalam dari adanya konflik. Sebuah konflik akan mengakibatkan rasa sakit baik secara fisik khususnya psikis. Hal tersebut kemudian menghasilkan *psychological needs* seperti keinginan mendapat pengakuan yang adil, otoritas, dan identitas yang pantas mereka dapat²⁷.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, hal. 29

²⁶ *Ibid.*, hal. 38

²⁷ *Ibid.*,

Pada akhirnya *psychological needs* akan membentuk sebuah emosi dimana memiliki peran penting dalam *manage* konflik. Sebagai contoh, merasakan penghinaan atas konflik yang terjadi akan memunculkan motivasi yang mendorong orang untuk membalas dendam, sehingga melahirkan lingkaran kekerasan yang terus berulang²⁸. Oleh karena itu emosi seringkali menjadi penghalang dalam proses penyelesaian konflik (hambatan emosional). Kita juga perlu untuk bisa membedakan hambatan tersebut, dengan begitu, akan membantu dalam menyingkirkan penghalang untuk mengakhiri konflik. Nadler mengkategorikan hambatan emosional menjadi dua yaitu; perasaan tidak percaya terhadap orang lain, dan perasaan terancam terhadap identitas orang lain²⁹. Berdasarkan dua hambatan tersebut, Nadler dan Shnabel kemudian memberikan penjelasan mengenai *Instrumental Reconciliation* dan *Socioemotional Reconciliation*.

Perbedaan paling mendasar dari kedua konsep tersebut adalah, pada *Socioemotional Reconciliation* ada upaya untuk mencari cara bagaimana bisa masing – masing kelompok yang berkonflik bisa mencapai *dealing with the past*. Sedangkan pada *Instrumental Reconciliation* tidak lagi berfokus pada masa lalu sebuah konflik. “*let bygones be bygones*” yang lalu biarlah berlalu, fokus utamanya adalah menciptakan koeksistensi yang terpisah dimana masing – masing kelompok bisa saling belajar untuk bisa percaya satu sama lain³⁰. Jadi bisa disimpulkan, tujuan utama dari *Socioemotional*

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hal. 41

³⁰ *Ibid.*, hal. 42

reconciliation adalah *integration*. Sebaliknya, *Instrumental* menekankan pada *separation*.

Berdasarkan pemikiran Amir (1969) dan Pettigrew (2008) dalam *thesis* Juri Grudina, kontak antar kelompok memainkan peran penting dalam membentuk sebuah hubungan³¹. Pernyataan tersebut kemudian membuat penulis menyimpulkan bahwa sebuah rekonsiliasi akan lebih ideal bila yang melakukan adalah korban dan pelaku atau dua kelompok yang saling berkonflik. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan emosional antara korban dan pelaku dicapai berdasarkan kesadaran dan keinginan mereka untuk melakukannya.

Disini penulis akan menggunakan konsep *Socioemotional Reconciliation* untuk menjelaskan bagaimana peran rekonsiliasi dapat dijalankan oleh korban dan pelaku secara berdampingan. Konsep tersebut dinilai penulis cukup relevan untuk diterapkan dalam kasus ini. *Socioemotional Reconciliation* dapat membantu mengidentifikasi siapa yang menjadi korban dan siapa pelakunya. Dengan begitu, analisa persiapan rekonsiliasi tidak terhambat pada siapa yang benar dan siapa yang salah.

Alasan lain pemilihan *Socioemotional Reconciliation* daripada *Instrumental Reconciliation* adalah fokus pandangannya terhadap masa lalu. Melalui konsep ini, penulis bisa menjelaskan bagaimana dua kelompok yang berkonflik dapat memulai rekonsiliasi dengan menghapus hambatan dari

³¹ Juri Grudina. 2012. *Bridging Separated Communities With the Use of Common Instrumental Goals*. hal. 30. Diakses dari <http://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/2878/2012%20Grudina.pdf?sequence=1>. Pada 15 Juni 2017.

proses *dealing with the past* yang menjadi penghalang keduanya untuk saling berinteraksi. Selain perbedaan fokus pandangan, *Socioemotional dan Instrumental Reconciliation* tidak bersifat mutualistik, yang artinya masing – masing memiliki kerangkanya sendiri³².

Socioemotional Reconciliation menjadi konsep yang berangkat dari sebuah ancaman. Korban mengalami ancaman terhadap identitas mereka sebagai *powerful actors*, sedangkan pelaku mengalami ancaman terhadap identitas sebagai *moral actors*³³. Kedua identitas tersebut kemudian membangkitkan perasaan tidak berdaya dan inferioritas moral. Untuk menghindari perasaan tersebut dan memperbaiki identitas yang terancam, mereka bisa melakukannya dengan dua alternatif cara (*The Unilateral Alternative*) atau (*The Interactive Alternative*)³⁴.

The Unilateral Alternative menjelaskan mengenai sebuah cara sepihak yang dilakukan baik oleh korban maupun pelaku untuk siap merekonsiliasi hubungan dengan cara mereka sendiri. Alternatif cara ini menjelaskan bahwa korban akan lebih siap merekonsiliasi hubungan apabila telah melakukan balas dendam (*revenge*) terhadap pelaku. Sedangkan pelaku akan lebih siap merekonsiliasi hubungan bila korban bisa melupakan kejahatan yang telah pelaku lakukan. Semacam sebuah pesan tersirat dari pelaku untuk menghindar dari tanggung jawab (*denying the painful consequences*). Baik korban maupun pelaku berusaha mengeliminasi

³² Arie Nadler, Thomas E. Malloy, Jeffrey D. Fisher. *Loc.,it* hal 41

³³ *Ibid.*, hal. 45

³⁴ *Ibid.*,

hambatan emosionalnya masing – masing tanpa menghiraukan satu sama lain.

Korban terbiasa dengan istilah yang melambangkan kurangnya kontrol dan merasakan ancaman terhadap harga diri mereka (*lack of control and loss power*). Untuk mengatasi ini, korban perlu mengembalikan harga dirinya dengan membalas dendam (*revenge*). Sebagai pelaku yang memegang kekuasaan selama episode konflik berlangsung, mereka tidak merasakan ancaman yang serupa. Justru mereka lebih khawatir terhadap citra mereka sebagai *moral actors*. Hal ini dikaitkan dengan rasa malu dan ketakutan para pelaku bahwa mereka akan ditolak oleh komunitas yang lebih luas. Sederhananya, balas dendam akan merubah ketimpangan (*power asymmetry*) antara korban dan pelaku selama konflik berlangsung. Sedangkan menghindar dari tanggung jawab (*denying the painful consequences*) adalah upaya menjauhkan diri pelaku dari kejadian masa lalu (*social distancing*).

Meskipun setelah balas dendam, korban mungkin merasa siap untuk mengakhiri konflik, hal tersebut tidak akan mendorong maju rekonsiliasi karena sifatnya sepihak. Disisi lain, pelaku dapat menolak konsekuensi dari tindakan mereka atas apa yang terjadi pada korban dengan dalih “korban masuk dalam konfliknya sendiri”. Menjauh dari kehidupan masa lalu dapat mengurangi beban pelaku terhadap rasa bersalahnya pada korban. Namun, sama halnya dengan balas dendam, ini adalah mekanisme sepihak yang tidak memfasilitasi rekonsiliasi.

Secara psikologis, pelaku akan menjauh dari masa lalu kelam yang pernah dilakukannya, begitulah yang diutarakan dalam konsep *Socioemotional Reconciliation*. Untuk memperkuat analisa terhadap tindakan *denying consequences*, penulis juga mengadopsi *Narrative Memory*. Salah satu aspek dalam rekonsiliasi berdasarkan tulisan Robert Scheiter adalah *Narration of Memory*³⁵. Sebuah upaya untuk menjaga agar masa lalu tidak terlupakan dan mengungkapkan kebenaran³⁶. Karena seberapapun menyakitkannya masa lalu baik bagi korban maupun pelaku, kebenaran didalamnya harus tetap dijaga.

The Unilateral Alternative menjadi alternatif yang dirasa dapat mendorong kedua pihak untuk merekonsiliasi hubungan, namun bukan menjadi satu – satunya alternatif cara yang dijelaskan dalam *Socioemotional Reconciliation*. Terdapat satu alternatif lain yaitu *The Interactive Alternative: The Needs-Based Model of the Apology-Forgiveness Cycle* dimana akan menjadi alternatif berikutnya apabila alternatif sebelumnya belum berhasil mengeliminasi hambatan emosional korban dan pelaku.

The Interactive Alternative: The Need-Based Model of the Apology-Forgiveness Cycle menjelaskan cara yang lebih interaktif kedua pihak dalam menghilangkan hambatan tentang identitas mereka³⁷. Cara ini memiliki beberapa tingkatan; (1) korban mengalami ancaman terhadap identitas sebagai *powerful actors*, dan pelaku mengalami ancaman terhadap identitas

³⁵ Robert Scheiter. 2008. *Establishing a Shared Identity: The Role of the Healing of Memories and of Narrative*. hal 8-10 dalam Sebastian C. H. Kim, Pauline Kollontai, Greg Hoyland. *Peace and Reconciliation: In Search of Shared Identity*. Pada 17 November 2017.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, hal. 47 – 53

sebagai *moral actors*. Keduanya dituntut untuk bisa mengeliminasi keinginan sepihaknya dalam memperbaiki identitas mereka dengan saling membagi masalah terhadap identitasnya. Penulis mengartikan cara ini hanya dapat dilakukan apabila dialog antar kedua pihak dapat berjalan dengan baik.

Tingkatan selanjutnya, (2) pelaku akan mencari sebuah penerimaan yang berisikan bahwa orang – orang pada akhirnya akan menerimanya dan memandangnya sebagai *moral actors (social acceptance)*, sedangkan korban akan mencari pengakuan atas ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka sekaligus menginginkan pemberdayaan untuk mengembalikan posisi mereka (*empowerment*). Dan pada akhirnya, (3) penerimaan dan pemberdayaan akan memenuhi kebutuhan emosional keduanya. Dari ketiga tingkatan tersebut kemudian penulis temukan masing – masing indikatornya yaitu; *Shared Identity*, *Ameliorate Threat of Identity*, dan *Restoration*.

Siklus dalam *The Interactive Alternative* berusaha memenuhi kebutuhan psikologis baik korban maupun pelaku. Bila pelaku meminta maaf dan mengakui tanggung jawab atas kesalahan masa lalu, hal ini memberikan korban sebuah kekuatan dan mengembalikan kontrol diri yang telah diambil dari mereka selama episode konflik berlangsung. Sebuah indikasi tercapainya *willingness to reconcile* adalah ketika korban bisa memahami kesalahan pelaku dan mereka memaafkannya, sekaligus menyiratkan kepada pelaku bahwa mereka tidak lagi dipandang amoral. Dengan demikian, penyelesaian *apology-forgiveness cycle* berhasil membuat korban dan pelaku mampu bergerak melampaui rintangan emosional.

Output atau tujuan dari *The Interactive Alternative* adalah menumbuhkan keinginan dari kedua pihak untuk mau melakukan rekonsiliasi (*willingness to reconcile*). Penelitian ini bukan bermaksud untuk melihat sebuah proses rekonsiliasi, karena rekonsiliasi sendiri sifatnya *long term*. Sedangkan secara garis waktu, konflik antara Kosovo dan Serbia bisa dikatakan masih baru. Untuk mencapai empat aspek rekonsiliasi yang dimaksud Lederach (*truth, mercy, justice, peace*) sendiri, sebelumnya, korban dan pelaku harus memiliki keinginan yang sama untuk melakukan rekonsiliasi.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pada sub bab ini, penulis akan mengoperasionalkan kesiapan diri korban dan pelaku dengan menggunakan konsep dari Arie Nadler dan Nurit Shnabel tentang *Socioemotional Reconciliation*, dalam buku yang berjudul “*The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*”. Bila boleh penulis artikan, *Socioemotional Reconciliation* sebenarnya merupakan kerangka pikir yang menjelaskan kondisi sebagai korban dan pelaku selama konflik berlangsung. Konsep tersebut menjelaskan bagaimana perasaan menjadi korban dan pelaku menghambat keduanya untuk saling berinteraksi kembali. Sulitnya menjadi korban dan beban menjadi pelaku tergambarkan melalui konsep tersebut, menjelaskan bahwa selama ini rintangan untuk merekonsiliasi hubungan terhambat oleh adanya penghalang emosional.

Sebelum konflik benar – benar berakhir, korban dan pelaku akan merasakan perasaan inferior terhadap identitasnya. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi etnis Albania sebagai penyintas / korban dan Pemerintah Serbia sebagai pelaku. Dalam konsep *Socioemotional Reconciliation*, dijelaskan bahwa secara naluri, korban akan melakukan tindakan balas dendam terhadap pelaku untuk mengembalikan identitasnya sebagai *powerful actors*. Maka, dalam operasionalisasinya penulis akan mencari fakta dimana ada upaya balas dendam dari etnis Albania terhadap Serbia.

Kondisi berikutnya adalah pelaku akan mencoba untuk menjauhkan diri dari tuduhan atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Dalam operasionalisasinya, penulis akan mencari fakta yang menunjukkan bahwa Pemerintah Serbia memang berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya

terhadap apa yang terjadi pada etnis Albania. Dalam hal ini penulis juga akan menjelaskan upaya penyintas / korban dalam melakukan tuntutan dan mendorong adanya tanggung jawab oleh Pemerintah Serbia. Penulis juga akan mencari data mengenai sampai mana keadilan bagi pelaku *ethnic cleansing* ditegakkan untuk mendukung argumen bahwa Pemerintah Serbia menghindari tanggung jawabnya.

Operasionalisasi berikutnya adalah mencari fakta bahwa kedua pihak melakukan interaksi dengan motivasi untuk menjalin komunikasi lebih baik. Pada tingkatan pertama, indikator yang bisa membantu adalah *Shared Identity*. Jika permasalahannya adalah ancaman mengenai masing – masing identitas, maka baik etnis Albania dan Pemerintah Serbia dituntut untuk bisa berkomunikasi untuk saling berbagi identitasnya, membentuk ulang keinginan keduanya untuk berdialog. Upaya tersebut berguna untuk meminimalisir adanya *double victimhood*.

Pada tingkatan kedua, *Ameliorate Threat of Identity* menjadi jaminan bagi kedua pihak. Korban akan mendapat jaminan untuk dapat diakui dan diberdayakan (*empowerment*) dan pelaku akan mendapat jaminan bahwa mereka akan diterima secara moral dalam komunitas (*social acceptance*). Pada tingkatan ketiga, setelah keinginan emosional masing – masing pihak telah terpenuhi, maka akan sampai pada proses restorasi (*restoration*). Sembari memastikan korban mendapatkan kembali *sense of power* dan pelaku mendapatkan kembali *moral image*. Segera setelah posisi dan kondisi masing – masing pihak kembali seperti semula, keinginan untuk berekonsiliasi diprediksi akan meningkat.

Berikut adalah tabel operasionalisasi yang penulis sediakan untuk mempermudah pemahaman konsep terhadap kasus;

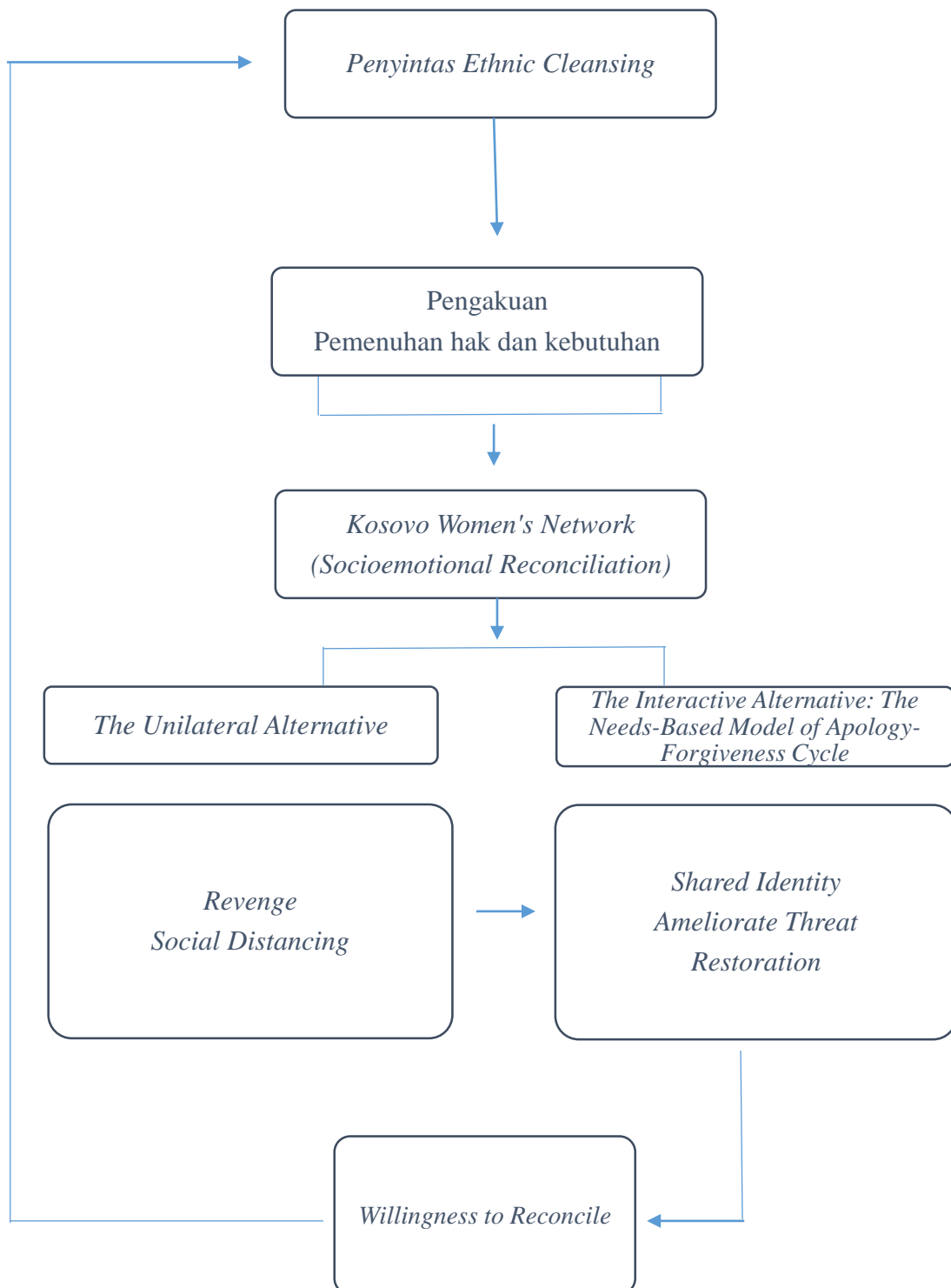
Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep *Socioemotional Reconciliation*

Konsep	Variabel	Penjelasan Variabel	Sub Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Socioemotional Reconciliation</i>	<i>The Unilateral Alternative: Revenge and Social Distancing</i>	Merupakan sebuah tindakan sepihak yang dilakukan baik oleh korban maupun pelaku. Korban akan berusaha membalas dendam atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (<i>revenge</i>) untuk mendapatkan <i>sense of power</i> nya. Sedangkan pelaku akan berusaha lari dari konsekuensi atas tindakan mereka (<i>social distancing</i>) untuk menjauh dari rasa bersalah atas kejadian masa lalu.	<i>Revenge</i>	<i>Lack of Control</i> <i>Loss of Power</i>	Untuk melihat kurangnya kontrol dan hilangnya kekuasaan atas diri korban dalam hubungan dua pihak yang berkonflik. Korban merasa perlu untuk mengembalikan perasaan akan penghargaan diri, kontrol diri, dan kesetaraan sosial.
			<i>Social Distancing</i>	<i>Denying the painful consequences</i> <i>Dehumanization of the victim</i>	Melihat keinginan pelaku untuk menjauh dari rasa bersalah atau dengan menghilangkan empati terhadap penderitaan korban. Pelaku bisa menyatakan bahwa korban sendiri yang menginginkan untuk berkonflik, jadi penderitaan pasca perang bukan menjadi satu – satunya kesalahan pelaku.

	<i>The Interactive Alternative: The Needs-Based Model of the Apology-Forgiveness Cycle</i>	Merupakan sebuah tindakan interaktif antara korban dan pelaku dalam mewujudkan keinginan untuk merekonsiliasi hubungan pasca konflik.	<i>Shared Identity</i>	<i>Acceptance by each side</i>	Untuk melihat sebuah perubahan sikap dan tingkah laku terhadap kelompok lain, atau bisa diartikan sebagai “ <i>penerimaan</i> ” dari masing – masing penyintas dan pelaku.
			<i>Ameliorate Threat of Identity</i>	<i>Empowerment and Social Acceptance</i>	Untuk melihat eliminasi ancaman identitas penyintas oleh pelaku. Untuk melihat eliminasi ancaman identitas pelaku oleh penyintas.
			<i>Restoration</i>	<i>Powerful Actors and Moral Actors</i>	Untuk melihat masing – masing penyintas dan pelaku mendapatkan <i>sense of power</i> dan <i>moral image</i> sehingga mendorong kesediaan merekonsiliasi hubungan.

2.4 Alur Pemikiran

Bagan 2.1 Alur Pemikiran.



2.5 Argumen Utama

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, maka argumen utama penulis mengenai kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam rekonsiliasi adalah; *pertama*, etnis Albania akan berusaha melakukan balas dendam terhadap Serbia untuk menghilangkan hambatan emosional terhadap inferioritas identitas mereka. *Kedua*, Pemerintah Serbia akan menolak mengakui kesalahannya, sebagai bentuk menjauh dari kejahatan yang pernah mereka lakukan untuk menghilangkan hambatan atas inferioritas moral yang dirasakan terhadap identitasnya. *Ketiga*, dalam indikator *Shared Identity*, komunikasi kedua pihak menandakan sebuah penerimaan sekaligus memperjelas siapa korban dan siapa pelaku untuk menghindari adanya *double victimhood* yang akan memunculkan hambatan baru “*Siapa yang bertanggung jawab?*”. *Keempat*, indikator *Ameliorate Threat of Identity* memberi jaminan bahwa ancaman mengenai identitas dapat hilang bila korban mendapatkan jaminan *empowerment* dan pelaku mendapat jaminan *social acceptance*. *Kelima*, indikator *Restoration* memungkinkan baik korban atau pelaku mendapatkan *sense of power* dan *moral imagenya* kembali. Dengan begitu, bisa meningkatkan keinginan untuk saling berdamai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitatif. Jenis penelitian tersebut bertujuan untuk menampilkan sebuah fenomena dengan menyediakan fakta – fakta yang ada di lapangan dengan analisis yang mendalam. Analisa tersebut menjelaskan mengenai kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation* dalam konflik Kosovo dan Serbia.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam mewujudkan rekonsiliasi dengan rentang waktu antara tahun 2008 – 2016. Tahun 2008 dipilih oleh penulis karena merupakan periode dimana Kosovo mendapatkan kemerdekaannya sekaligus menjadi awal periode pasca transisi kepemimpinan Slobodan Milosevic. Sedangkan tahun 2016 adalah periode terbaru yang bisa penulis ambil untuk melihat kesiapan para penyintas dan Pemerintah Serbia dalam merekonsiliasi hubungan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dari beberapa sumber, dengan tujuan untuk membantu mendapatkan data yang dibutuhkan penulis selama penelitian berlangsung. Sumber data tersebut meliputi; buku, jurnal, *thesis*, *press release*, artikel, dan opini para ahli.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan jenis analisa data kualitatif. Dimana dengan jenis analisa tersebut, penulis dapat menjelaskan dan menjabarkan bagaimana kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam rekonsiliasi antara Kosovo dan Serbia.

3.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan *urgensi* dari penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II Kerangka Penelitian: Bab ini berisi studi terdahulu mengenai beberapa penelitian yang sudah pernah digunakan sebelumnya, kerangka konseptual yang mana penulis menggunakan konsep rekonsiliasi, operasionalisasi konsep yang digunakan penulis, alur pemikiran yang membantu penjabaran alur penelitian, dan argumen utama dari penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian: Menjelaskan mengenai teknik yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan kemudian sistematika penulisan.

BAB IV Pembahasan: Dampak dan upaya resolusi konflik Kosovo

BAB V Pembahasan: Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation* Konflik Kosovo dan Serbia.

BAB VI Kesimpulan: Menjawab hasil penelitian bagaimana kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam merekonsiliasi hubungan.

BAB IV PEMBAHASAN

Dampak dan Upaya Resolusi Konflik Kosovo

4.1 Kosovo

4.1.1 Gambaran Umum

Kosovo adalah negara yang terletak dibagian tenggara Eropa, berbatasan langsung dengan Serbia, Macedonia, dan Albania¹. Luas wilayah Kosovo bekisar 10.887 kilometer persegi, menjadi negara yang tidak memiliki garis pantai karena merupakan negara *landlock*. Negara dengan Ibu Kota Pristina ini, diperkirakan memiliki jumlah penduduk mencapai 1,8 juta jiwa yang meningkat dari 1,7 juta dari sensus pada tahun 2011². Komposisi populasi terbesar berada di wilayah Ibu Kota sebanyak 210.000 jiwa yang didominasi oleh etnis Albania, sedikit etnis Bosnia, Serbia dan Romania. Tercatat sekitar 92% populasi adalah etnis Albania, sedangkan sejak tahun 1999 populasi etnis Serbia menurun drastis semenjak konflik dengan Serbia terjadi³.

Sampai pada abad 20, Kosovo merupakan bagian dari Serbia dan Kekaisaran Ottoman. Ketika Kekaisaran Ottoman berhasil dikalahkan sepenuhnya pada tahun 1913, Kosovo menjadi bagian dari Kerajaan Serbia⁴. Banyak peristiwa yang terjadi setelah perebutan wilayah oleh Kerajaan Serbia dan Kekaisaran Ottoman. Salah satunya adalah keinginan Kosovo untuk keluar

¹ The World Factbook. *Europe: Kosovo*. 2017. Diakses dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>. Pada 01 Oktber 2017.

² World Population Review. *Kosovo Population*. 2017. Diakses dalam <http://worldpopulationreview.com/countries/kosovo-population/>. Pada 01 Oktober 2017

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

dari teritori Serbia dan menginginkan negara independen. Etnis Albania merasa bahwa keinginan Slobodan Milosevic untuk mewujudkan *The Greater Serbia* tidak sepenuhnya mewakili kepentingan etnis Albania⁵.

Dalam rangka merespon keinginan etnis Albania yang ada di Kosovo untuk memisahkan diri dari Serbia, Presiden Serbia, Slobodan Milosevic melakukan beberapa tindakan kekerasan berupa kampanye *ethnic cleansing*. Pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pengusiran paksa dilakukan untuk menciptakan rasa takut bagi mereka yang ingin menentang keinginan Slobodan Milosevic⁶. Hal tersebut mengantarkan perjalanan panjang Kosovo untuk bisa menjadi negara independen yang di cita – citakan. Pada akhirnya deklarasi kemerdekaan dari Serbia baru terlaksana pada tahun 2008 melalui banyak proses negosiasi⁷.

Pada masa deklarasi kemerdekaan tersebut, Kosovo menjadi negara yang mendapat penanganan sementara dari PBB untuk segala urusan administrasi negaranya⁸. Salah satu upaya PBB dalam hal tersebut adalah membentuk badan khusus bernama *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Wewenang yang diberikan kepada UNMIK, kemudian menjadi bentuk perwujudan dari terminologi *An Agenda for Peace* yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal PBB tahun 1992, Bhoutros Bhoutros Ghali⁹. Agenda tersebut berisikan tiga pilar pembentukan perdamaian meliputi *peacemaking*,

⁵ Victoria Ward. *Serbian War Criminals: Slobodan Milosevic Profile*. 2017. Diakses dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/serbia/8538575/Serbian-war-criminals-Slobodan-Milosevic-profile.html>. Pada 01 Oktober 2017

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ BBC News. *Kosovo Profile*. 2017. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-18328859>. Pada 01 Oktober 2017.

⁹ United Nations Secretary – General. 1992. *An Agenda for Peace*. Sesi 47. Diakses dalam <http://www.un-documents.net/a47-277.htm>. Pada 01 Oktober 2017.

peacekeeping, dan *peacebuilding* yang akan menjadi aktivitas utama bagi UNMIK di Kosovo.

Kehadiran UNMIK dalam *peacemaking* adalah untuk terlibat didalam proses pecahnya konflik sekaligus menyelesaikan masalah – masalah yang menjadi penyebab konflik. Melalui *peacekeeping*, UNMIK bekerja untuk memelihara perdamaian yang masih rapuh, dimana pertempuran telah dihentikan dan membantu dalam pelaksanaan perjanjian damai yang telah dicapai oleh kedua belah pihak¹⁰. Sedangkan fungsi *peacebuilding* yang harus dijalankan oleh UNMIK adalah kesiapan untuk membantu membangun kembali institusi dan infrastruktur negara akibat *inter – state war* yang melanda Kosovo¹¹. Pada tahap ini, terdapat upaya DDR (*disarmament, demobilization, reintegration*) dan SSR (*security sector reform*) yang berperan penting dalam mencegah kebangkitan konflik bersenjata. Selain itu, DDR dan SSR dapat menciptakan sebuah kondisi perdamaian berkelanjutan termasuk pembangunan jangka panjang¹².

4.1.2 Sejarah dan Konflik Kosovo

Sejarah mengungkapkan bahwa Kosovo menjadi simbol penting, baik bagi etnis Albania maupun Serbia, bisa terlihat dari kuatnya perebutan teritori antar keduanya¹³. Sampai sebelum tahun 1946, status politik Kosovo terus berganti akibat perebutan dan konflik besar antar kekaisaran. Pada abad 13, tepatnya tahun 1389 menjadi penanda kekalahan Kerajaan Serbia melawan

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² DDR and Security Sector Reform. 2009. hal. 1. Diakses dalam [http://www.unddr.org/uploads/documents/IDDRS 6.10 DDR and SSR.pdf](http://www.unddr.org/uploads/documents/IDDRS%206.10%20DDR%20and%20SSR.pdf). Pada 01 Oktober 2017.

¹³ Michael Lund. *Kosovo: Chronology*. hal 1. Diakses melalui <http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/database/Kosovo/kosovo.pdf>. Pada 01 Oktober 2017.

Kekaisaran Ottoman sekaligus menjadi awal bagi Ottoman menguasai wilayah Balkan¹⁴. Berdasarkan dari kekalahan tersebut, Kerajaan Serbia menganggap Kosovo sebagai simbol perlawanan yang suatu saat nanti akan direbut kembali dari Kekaisaran Ottoman.

Butuh waktu cukup lama, namun Serbia berhasil mengusir Kekaisaran Ottoman dalam Perang Balkan pertama pada tahun 1912¹⁵. Namun, orang – orang Albania yang telah tinggal lama di wilayah itu merasa inilah momen dimana mereka bisa membentuk gerakan kemerdekaan. Momen itulah yang menandai kebangkitan Kosovo. Hingga sampai saat ini, Kosovo dianggap sebagai tanah kelahiran etnis Albania¹⁶. Kedua etnis tersebut memiliki alasannya tersendiri untuk mempertahankan Kosovo sebagai identitasnya.

Berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918, terbentuklah Yugoslavia yang terdiri dari Kerajaan Serbia, Kroasia, Slovenia yang juga terdiri dari beberapa populasi Austro Hungarian dan Kekaisaran Ottoman. Tentu Kosovo juga termasuk kedalam Yugoslavia, namun pada Perang Dunia II dibawah kendali Italia, Kosovo kembali bergabung dengan Albania¹⁷. Dalam beberapa dekade terakhir, tercatat kelahiran dan imigrasi etnis Albania bersama emigrasi etnis Serbia turut meningkatkan konsentrasi populasi di Kosovo¹⁸. Peningkatan jumlah populasi tiap tahun juga mempengaruhi budaya, gaya bahasa, dan agama

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Office of the Historian, Bureau of Public Affairs. *A Guide to the United States "History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: Kosovo*. 2017. Diakses dalam <https://history.state.gov/countries/kosovo>. Pada 01 Oktober 2017.

¹⁸ Helge Brunborg. 2002. *Report on the size and ethnic composition of the population of Kosovo*. hal 1. Diakses dalam http://www.icty.org/x/file/About/OTP/War_Demographics/en/milosevic_kosovo_020814.pdf. Pada 02 Oktober 2017.

yang menciptakan sentimen nasionalis tersendiri antara etnis Albania dan Serbia¹⁹.

Pada tahun 1946 melalui upaya Marshal Tito, konstitusi Yugoslavia memberikan jaminan pada Kosovo untuk mendapat status wilayah otonomi sendiri dibawah Republik Serbia²⁰. Terpisahnya konstitusi Republik Serbia dengan Kosovo juga menjamin bahwa mereka bisa menjalankan aturan pemerintahannya sendiri. Namun, orang – orang Albania tetap meminta otonominya dan ingin diakui sebagai Republik Kosovo. Tidak jauh setelahnya, tahun 1974, Yugoslavia mengadopsi konstitusi baru dimana Kosovo diberikan status sebagai provinsi dengan otonomi yang setara dengan negara republik²¹.



Gambar 4.2 – Peta *claim* politik Kosovo

Marshal Tito berusaha memberikan fasilitas yang sama antara etnis Albania dan Serbia yang tinggal di Kosovo serta antara Kosovo dan Serbia melalui sebuah kebijakan dengan membagikan otoritas dan kontrol politik pada

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Wheeling Jesuit University. *The Balkans: Kosovo Within Yugoslavia*. 2002. Diakses dalam <http://www.cotf.edu/earthinfo/balkans/kosovo/KVtopic4.html>. Pada 02 Oktober 2017.

²¹ *Ibid.*,

komunitas dan pemimpin etnis masing – masing²². Namun tetap saja terdapat ketidakpuasan yang muncul dari kedua etnis. Etnis Albania merasa kecewa dengan ketidakmampuannya menjadikan Kosovo sebagai negara Republik. Sedangkan etnis Serbia sangat membenci segala pengakuan atas etnis Albania yang diberikan oleh Marshal Tito. Upaya yang dilakukan oleh Marshal Tito justru menyebabkan disintegrasi antara etnis Albania dan Serbia dan meninggalkan potensi konflik ter eskalasi ketika negara – negara Yugoslavia memilih untuk membubarkan diri.

Kematian Marshal Tito pada 1980 menyulut gelombang demonstrasi oleh etnis Albania dan penindasan oleh pemerintah Serbia²³. Pada tahun – tahun berikutnya, Slobodan Milosevic yang berasal dari Partai Komunis Serbia muncul dengan memanfaatkan kehancuran Yugoslavia dengan upayanya mengumpulkan kembali sisa – sisa dendam Serbia. Slobodan Milosevic melihat kesempatan untuk mendominasi dan menantang Albania, Slovenia, Kroasia, Macedonia, dan Bosnia. Setelah terpilih menjadi Presiden, pada 1989, Slobodan Milosevic menarik kembali status otonomi yang diberikan Tito kepada Kosovo dan memberhentikan semua pegawai, menggantinya dengan pendukung *the greater Serbian* di Kosovo²⁴.

Sebuah Disintegrasi antara Etnis Albania dan Serbia

Gelombang protes yang terus menerus datang dari etnis Albania membuat Slobodan Milosevic mengumumkan bahwa Kosovo berada pada status darurat dan menurunkan pasukan keamanan di setiap area. Dibawah

²² Michael Lund. *Op.,cit*

²³ Michael Lund. *Op.,cit*

²⁴ Armend R. Bekaj. *The KLA and the Kosovo War*. 2010. hal 16. Diakses dalam http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/Transitions_Series/transitions8_kosovo.pdf. Pada 02 Oktober 2017.

hukum perang, pemerintah federal memutuskan untuk menutup Ibu Kota Phristina dan media massa, mengambil alih pemerintahan dan mulai menghentikan etnis Albania dari pekerjaan dan aktivitas bersekolahnya. Sebagai bentuk reaksi perlawanan, etnis Albania di Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia pada Juli 1990²⁵. Secara *de facto*, Ibrahim Rugova, pemimpin kemerdekaan Kosovo mengumumkan bahwa Albania dan Kosovo bukan lagi bagian dari Yugoslavia²⁶.

Sadar akan ancaman meningkatnya kekerasan dari militer Serbia, Rugova kemudian menggunakan kampanye perdamaian untuk meredam superioritas Slobodan Milosevic. Etnis Albania membentuk sendiri pemerintahannya, membangun perekonomian dan sistem layanan sosial yang berdampingan dengan pemerintahan Serbia²⁷. Organisasi politik bentukan Albania (*Democratic League of Kosovo*) berupaya untuk mendapatkan kembali otonominya sedangkan Rugova, sebisa mungkin berusaha meminta bantuan dan perlindungan dari PBB.

Keputusan Marshal Tito untuk membagi otoritas dan kontrol politik pada tiap – tiap etnis kini tergantikan dengan hubungan saling bermusuhan antara etnis Albania dan Serbia. Pada Mei 1992, pemerintah Serbia mengundang perwakilan dari etnis Albania untuk membicarakan mengenai status Kosovo²⁸. Pemimpin Albania meminta dengan tegas bahwa pertemuan tersebut harus netral dibawah sepengetahuan komunitas internasional. Permintaan tersebut menandakan bahwa terdapat upaya dari Albania untuk membawa isu tersebut

²⁵ *Ibid.*, hal 16-18

²⁶ *Ibid.*, hal 16-18

²⁷ *Ibid.*, hal 17-20

²⁸ Michael Lund. *Op.,cit*

ke ranah internasional (*internationalize*). Disisi lain, pihak Serbia berpendapat bahwa konflik yang sedang terjadi adalah konflik internal dan harusnya bisa diselesaikan oleh otoritas negara.

Akhirnya PBB beserta *European Community* (EC) mengadakan konferensi internasional bersama negara bentukan Yugoslavia (ICFY)²⁹. Namun, begitu fokus tertuju pada Kosovo, perhatian langsung teralihkan pada isu kawasan. Pada tahun 1992 – 1995, perang yang terjadi di Bosnia menyita banyak perhatian dunia internasional, membuat isu perpecahan di Kosovo teralihkan. Kiranya bila perang di Bosnia adalah pengalihan isu untuk mencegah Kosovo keluar dari masalahnya, maka yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic bisa dikatakan berhasil. Sejauh ini, yang penulis ketahui tentang perang di Bosnia adalah perang tersebut juga melibatkan Serbia didalamnya³⁰.

Keterlibatan aktor internasional lain datang dari *humanitarian assistance* yang di inisiasi oleh *The Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE)³¹. CSCE menjadi organisasi internasional pertama yang fokus pada isu *human right* di Kosovo³². CSCE mengeluarkan misi untuk menstabilkan situasi pada tiga area yang didominasi oleh Serbia. Namun, upaya tersebut dihalangi oleh Slobodan Milosevic dengan penolakan terhadap visa kerja yang membuat aktivitas CSCE di Kosovo menjadi terbatas³³. Sebagai

²⁹ United Nations Archives. *International Conference on the Former of Yugoslavia*. 2017. Diakses dalam <https://search.archives.un.org/international-conference-on-former-yugoslavia-icfy>. Pada 03 Oktober 2017.

³⁰ John. R Lampe. *Bosnian Conflict: European History [1992-1995]*. 2017. Diakses dalam <https://www.britannica.com/event/Bosnian-conflict>. Pada 03 Oktober 2017.

³¹ Armend. R Bekaj. *Op.,cit* hal 24.

³² Armend. R Bekaj. *Op.,cit*

³³ Armend. R Bekaj. *Op.,cit*

reaksi masuknya CSCE pada perang Bosnia, Serbia menolak memperbarui ijin negara atas misi CSCE hingga akhirnya misi CSCE bisa di akhiri.

Pada tahun 1996, Ibrahim Rugova dan oposisinya mulai kehilangan kepercayaan karena gagal memenuhi keinginan etnis Albania untuk memenangkan dukungan masyarakat internasional³⁴. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat pada tahun 1995, *Dayton Accords* hanya menerima Kroasia dan Bosnia legal secara etnis untuk mendiami suatu wilayah³⁵. Rugova dan elit politik tetap dianggap gagal meskipun telah mengangkat isu kemanusiaan di Kosovo. Kegagalan tersebut turut memberi tekanan pada *Democratic League of Kosovo* bentukan Rugova yang semakin memperburuk citranya sebagai satu – satunya organisasi politik bentukan Albania.

Pada tahun 1997, beberapa kemajuan telah berhasil diciptakan dengan disetujuinya perjanjian mengenai bidang pendidikan antara Slobodan Milosevic dan Ibrahim Rugova³⁶. Di fasilitasi oleh *Italian Roman Catholic* dan di dukung oleh *European Union* (EU) dan United States, salah satu isi perjanjian ini adalah tentang persetujuan untuk membuka kembali semua level pendidikan negeri untuk seluruh pelajar dan tenaga ajar di Kosovo³⁷. Langkah ini dianggap menjadi upaya signifikan dari komunitas internasional untuk menekan konflik Kosovo.

³⁴ Michael Lund. *Op.,cit*

³⁵ Bill Clinton. *Dayton Accords: International Agreement*. 2017. Diakses dalam <https://www.britannica.com/event/Dayton-Accords>. Pada 03 Oktober 2017.

³⁶ Anna Husarska. *Milosevic Shows His True Colors on Education Accord*. 1998. Diakses dalam <http://www.nytimes.com/1998/09/05/opinion/milosevic-shows-his-true-colors-on-education-accord.html>. Pada 03 Oktober 2017.

³⁷ Kosovar Institute for Policy Research and Development. *The Implementation of Agreements of Kosovo-Serbia Political Dialogue*. 2013. Diakses dalam http://www.kipred.org/repository/docs/THE_IMPLEMENTATION_OF_AGREEMENTS_OF_KOSOVO%E2%80%90SERBIA_POLITICAL_DIALOGUE_373680.pdf. Pada 04 Oktober 2017.

Skenario lain yang bisa diwujudkan adalah, jika kebutuhan sosial dan ekonomi terakomodasi dengan baik antara dua komunitas yang terpisah, mungkin kian lama, isu politik dan konstitusi bisa menjadi lebih minim konfrontasi³⁸. Hal tersebut memunculkan harapan untuk bisa mengarahkan pada perjanjian lain, namun perjanjian terkait bidang pendidikan tidak tanpa dampak. Implementasi gabungan antara Albania dan Serbia justru memunculkan belenggu isu prosedural³⁹. Daripada meredakan tensi dan membuat hubungan lebih baik, perjanjian tersebut justru membuat tensi antar kedua pihak menjadi lebih buruk.

Hasilnya, Rugova kembali gagal mendapatkan keuntungan substansial untuk masyarakat Albania, oposisi juga mulai untuk memaksa menggunakan pendekatan yang lebih tegas⁴⁰. Rencana penyerangan pertama oleh etnis Albania bisa dilihat pada April 1996, dimana terdapat empat penyerangan terkoordinasi di empat lokasi yang berbeda (Stimlje, Pec, Kosovska, dan Mitrovica)⁴¹. Dua polisi Serbia tercatat terbunuh dan tiga lainnya mengalami luka dalam penyerangan tersebut.

Sejauh ini, koordinasi penyerangan tersebut penulis ketahui berasal dari *Kosovo Liberation Army* (KLA) yang secara berani mengakui bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pasukan keamanan Serbia⁴². Aktivitas KLA mencerminkan bagaimana etnis Albania di Kosovo mengembangkan dengan baik kapasitasnya untuk membentuk penyerangan yang sistematis, tercatat pada

³⁸ Michael Lund. *Op.,cit*

³⁹ Michael Lund. *Op.,cit*

⁴⁰ Michael Lund. *Op.,cit*

⁴¹ Colleen Sullivan. *Kosovo Liberation Army: Kosovar Militant Group*. 2017. Diakses dalam <https://www.britannica.com/topic/Kosovo-Liberation-Army>. Pada 04 Oktober 2017.

⁴² *Ibid.,*

tahun 1997, KLA berhasil mengambil alih kontrol di banyak area pedalaman Kosovo⁴³.

Bermula pada tahun 1998, pasukan keamanan Serbia merespon tindakan KLA dengan aksi intimidasi yang bisa dilihat dari meningkatnya penyerangan melawan sipil Albania dan KLA⁴⁴. Aksi saling balas menjadi inisiatif masing – masing pihak untuk mempertahankan posisinya. Pasukan keamanan Serbia yang terdiri dari polisi militer dibantu oleh tentara menganggap KLA sebagai organisasi teroris⁴⁵. Hal tersebut kemudian penulis nilai sebagai strategi Serbia agar setiap serangan yang dilancarkan terhadap KLA tidak banyak mendapat perhatian komunitas internasional.

Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, perang yang sempat terjadi di Bosnia merubah konflik Kosovo menjadi isu internasional⁴⁶. Tidak sampai pada tahun 1998, telah tercatat adanya peningkatan jumlah personil militer yang diterjunkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dari peningkatan tersebut, konflik Kosovo bukan lagi dilihat sebagai konflik internal, namun mulai mendapat perhatian dan menjadi sebuah krisis internasional.

Laporan dari *Human Right Watch* mengungkapkan adanya kampanye yang terorganisir dan sistematis untuk melakukan teror, pembunuhan, pengusiran etnis Albania dari Kosovo yang dilakukan oleh pemerintah tertinggi Serbia pada saat itu⁴⁷. Sejauh yang penulis pahami, hal tersebut dilakukan dengan dua maksud, yaitu; *pertama*, berniat untuk merubah komposisi

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ John. R Lampe. *Op., cit*

⁴⁷ ⁴⁷ Human Rights Watch. 2001. *UNDER ORDERS: War Crimes in Kosovo*. hal 3-5. Diakses melalui https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Under_Orders_En_Combined.pdf. Pada 07 November 2018.

demografi Kosovo. *Kedua*, berniat untuk merenggangkan hubungan Albania dan Macedonia⁴⁸.

Pembunuhan penduduk sipil secara sengaja adalah kunci dari sebagian kampanye “*cleansing*”. Beberapa penduduk yang tinggal di provinsi strategis, kebanyakan adalah *noncombatant*, termasuk perempuan dan anak – anak ikut terbunuh oleh militer Serbia serta pasukan keamanan Yugoslavia. Pada Juli 2001, *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY) mencoba mengklarifikasi angka korban pembunuhan, dan menemukan setidaknya 4.300 jasad yang menjadi korban pembunuhan⁴⁹.

Pemeriksaan dan kekerasan seksual lain juga menjadi komponen dari kampanye “*cleansing*”. Pemeriksaan bukan menjadi hal yang dilakukan secara individu oleh pasukan keamanan Serbia dan Yugoslavia, namun telah menjadi instrumen untuk melakukan teror terhadap penduduk sipil, memeras uang, dan memaksa etnis Albania untuk meninggalkan rumahnya⁵⁰. *Human Right Watch* menemukan 96 kasus tercatat sebagai kekerasan seksual, namun angka sebenarnya bisa lebih dari itu.

Penghancuran *property* atau kekayaan berupa rumah milik penduduk sipil semakin meluas. Berdasarkan *survey* UNHCR pada November 1999, setidaknya hampir 40% semua rumah mengalami kerusakan berat atau sampai hancur total. Kota yang memiliki hubungan kuat dengan KLA mengalami penghancuran paling buruk karena penyerangan sudah dimulai sejak 1998. Namun area lain yang tidak memiliki sejarah hubungan dengan KLA juga

⁴⁸ *Ibid.*, hal 6

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

mengalami penghancuran yang sama, bahkan di Pec, lebih dari 80% rumah mengalami kerusakan berat⁵¹.

Bangunan sekolah dan masjid pun mendapat dampak yang sama. Berdasarkan pada laporan taksiran kerusakan 649 sekolah di Kosovo oleh *United Nations*, lebih dari 15% sekolah di *survey* mengalami kerusakan berat, dan lebih dari 60% hancur total. Pasukan keamanan Serbia dan Yugoslavia juga dengan sengaja membuat sumur – sumur air tidak bisa digunakan dengan membuang zat kimia, hewan mati, atau jasad manusia dalam sumur. *Human Right Watch* mencatat, terdapat 4 desa dimana korban pembunuhan dibuang kedalam sumur air⁵².

4.2 Dampak Konflik Terhadap Perempuan Kosovo

Kampanye *ethnic cleansing* yang tercatat dalam konflik Kosovo dan Serbia meninggalkan ingatan kelam bagi banyak korban yang selamat, mungkin menjadi ingatan yang tidak dapat diubah. Pemerkosaan massal selama konflik etnis juga meninggalkan trauma psikologis bagi para perempuan dan anak – anak, semacam sebuah bentuk penghancuran terhadap kelompok etnis Albania. Dalam kampanye tersebut, kebanyakan pasukan keamanan menggunakan pemerkosaan sebagai sebuah taktik untuk menciptakan rasa takut, trauma, bahkan kematian bagi perempuan dan anak – anak.

Pemerkosaan menjadi salah satu taktik licik bagi pasukan keamanan. Daripada harus membunuh targetnya, kejahatan berupa pemerkosaan lebih sulit untuk dibuktikan⁵³. Tidak ada mayat sebagai bukti, dan pengadilan

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, hal 9.

⁵³ Lisa Sharlach. 2000. *Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda*. hal 90. Diakses dalam <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/713687893>. Pada 10 November 2017.

kejahatan perang jarang mengusut kasus terhadap pasukan keamanan atas pemerkosaan yang dilakukannya⁵⁴. Pasukan keamanan dan pemerintah tidak pernah mengakui telah melakukan dan merencanakan pemerkosaan sebagai strategi mereka. Dalam banyak sumber ditulis bahwa pemerkosaan bisa dibuktikan melalui tes medis, namun permasalahannya adalah, tidak banyak yang ingin diketahui bahwa dirinya adalah korban pemerkosaan saat perang karena stigma yang selalu diasosiasikan buruk pada korban, membuat kejahatan perang ini semakin sulit ditangani⁵⁵.

Perempuan yang mengalami pelecehan seksual selama perang di Kosovo berlangsung telah banyak melakukan perjuangan untuk bisa diakui selama kurang lebih dua dekade. Berdasarkan penuturan seorang penyintas, hampir selama 17 tahun ini dia menyembunyikan hidupnya, selama perang berlangsung tahun 1999, dia mengalami pemerkosaan masal oleh pasukan keamanan Serbia. Ketika putranya menemukan fakta tersebut, seketika itu keluar pertanyaan *“Mengapa kau tidak meminta mereka untuk membunuhmu?”*. Itu adalah reaksi pertama dari keluarganya sendiri, lalu apa yang akan orang lain katakan terhadap para penyintas. Merasa takut dengan hinaan yang akan menimpanya, mereka memutuskan untuk menyembunyikan penderitaannya⁵⁶.

Kebanyakan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan oleh pasukan keamanan Serbia dan atau Yugoslavia takut jika mereka akan hamil⁵⁷.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Kristen Chick. 2016. *Ending the Shame of Kosovo's Rape Victims*. hal 1. Diakses dalam <http://foreignpolicy.com/2016/02/22/therapevictimsoskovobosniacommission/>. Pada 10 November 2017.

⁵⁷ Human Rights Watch. 2000. *Kosovo: Rape as Weapon of "Ethnic Cleansing"*. hal 16. Diakses dalam <http://www.refworld.org/docid/3ae6a87a0.html>. Pada 10 November 2017.

Diatas ketakutan itu, masih ada beberapa perempuan yang bahkan malu terhadap dirinya yang telah mengalami pemerkosaan masal pada masa perang. Salah satu ahli *gynecologist* mengatakan bahwa perempuan tersebut masuk kedalam kategori perempuan yang mengalami penderitaan atas konsekuensi psikologis baik dalam keluarga maupun sosial masyarakat⁵⁸.

Penyintas yang bersedia di *interview* oleh *Human Right Watch* terlihat mengalami trauma dengan level yang cukup tinggi menghadapi budaya tabu yang diasosiasikan dengan pemerkosaan. Dalam satu kasus, korban yang berhasil kembali ke keluarganya setelah diculik dan diperkosa, memiliki keinginan cukup tinggi untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak mampu menerima kenyataan. Akibatnya, anggota keluarga takut untuk meninggalkannya sendirian.

Beberapa penyintas berhasil mendapat dukungan emosional dari teman dan keluarga, namun penyintas lain merasa takut untuk berbicara, bahkan mengakui, merasa buruk bila mereka harus disalahkan atas pemerkosaan yang menimpa mereka, merasa takut untuk dijauhi oleh teman dan keluarga, dan takut tidak akan bisa menikah. Selama pemerkosaan dipandang memalukan oleh komunitas etnis Albania di Kosovo, banyak perempuan yang sulit menemukan keberanian mengungkapkan pengalaman buruknya.

Banyak perempuan yang menjadi penyintas tidak ingin melaporkan kasusnya karena bermacam alasan. Beberapa korban mengekspresikan rasa takut bahwa dia tidak akan bisa menikah. Perempuan lain merasa buruk bila harus dijauhi oleh kehidupan sosialnya. Namun, terdapat perempuan yang

⁵⁸ *Ibid.*,

mengekspresikan rasa marahnya dengan memberikan kesaksian kepada *International Criminal Tribunal of Yugoslavia (ICTY)*, berharap mendapat keadilan untuk mereka yang menderita akibat *ethnic cleansing*⁵⁹.

Perempuan dan anak – anak korban pemerkosaan dan kekerasan seksual lain selama konflik Kosovo berlangsung, menghadapi penghalang cukup besar untuk mendapatkan keadilan, perawatan medis, dan dukungan baik secara psikis maupun sosial. Pembunuhan dan pelanggaran atas hak asasi manusia di Kosovo telah merubah struktur dalam masyarakat⁶⁰. Meskipun begitu, pandangan tradisional terhadap para perempuan masih dipertahankan. Dalam area pedesaan, perempuan telah lama dipandang sebagai sebuah pilar yang menopang keluarga dan seorang martir untuk negaranya⁶¹.

4.2.1 Gender Based Violence

Dalam beberapa komunitas, peran perempuan dalam kehidupan sosial diibaratkan sebagai sosok ibu pertiwi yang melambangkan kehormatan etnisnya. Ketika kehormatan perempuan dinodai dengan pemerkosaan, etnisnya juga akan kehilangan kehormatannya⁶². Terkadang, untuk mengembalikan kehormatan tersebut, kelompok etnis akan mengasingkan atau mengusir perempuan atau anak – anak yang menjadi korban pemerkosaan. Para penyintas akan mengalami trauma pasca pemerkosaan yang masuk dalam istilah “*the second rape*”⁶³. Perempuan dalam istilah “*the second rape*” akan

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, hal 18

⁶¹ *Ibid.*, hal 18

⁶² Lisa Sharlach. *Op.,cit*

⁶³ Lisa Sharlach. *Op.,cit*

diibaratkan sebagai *pariah* (kasta terendah di India) baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, perempuan yang kehilangan anggota keluarga pada saat perang terjadi menanggung beban cukup berat karena *gender* yang dibawanya. Menjadi perempuan di Kosovo berarti memiliki kecenderungan untuk sulit mendapatkan pekerjaan⁶⁴. Penelitian terakhir mengungkapkan bahwa hanya 1 dari 10 perempuan yang dapat bekerja di Kosovo karena adanya *gender gap*. Menjadi perempuan di Kosovo juga berarti kemungkinan besar tidak akan mewarisi kekayaan keluarga atau kekayaan apapun⁶⁵.

Hari ini, para penyintas atau korban yang masih hidup dan berhasil bertahan dari konflik yang melibatkan kekerasan seksual masih harus menghadapi tantangan yang sangat besar⁶⁶. Perlakuan dan sikap masyarakat terhadap para penyintas telah menyebabkan beberapa kematian akibat bunuh diri. Stigmatisasi tersebut kemudian juga memotong akses terhadap layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan, termasuk mereka yang tinggal di area yang tidak memiliki lembaga swadaya masyarakat penyedia layanan kesehatan⁶⁷.

Kebutuhan mereka yang diidentifikasi sebagai korban kekerasan seksual sangat beragam. Akses pada kesehatan dan finansial adalah prioritas utama bagi banyak janda, orang tua tunggal, perempuan yang menikah dengan

⁶⁴ Hana Marku. 2015. *What it means to be a woman and a survivor of war in Kosovo*. Diakses dalam <https://www.opendemocracy.net/5050/hana-marku/what-it-means-to-be-woman-and-survivor-of-war-in-kosovo>. Pada 11 November 2017.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ United Nations Women. *Technical Report: The Conflict Did Not Bring Us Flowers*. 2016. hal. 7. Diakses dalam http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/the-conflict-did-not-bring-us-flowers_eng.pdf?vs=5055. Pada 10 November 2017.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 8

seorang yang terluka dalam perang, dan orang – orang dengan disabilitas menghadapi kesulitan lain⁶⁸. Penyintas yang memiliki anak hanya bisa bergantung pada kemampuan mandiri untuk menghidupi dan mendidik anaknya dengan harapan dapat menyediakan kehidupan yang lebih baik.

Beberapa tahun belakangan, banyak upaya telah diambil oleh beberapa aktor di Kosovo dalam rangka melindungi hak – hak para penyintas dan menyediakan apa yang mereka butuhkan⁶⁹. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, sampai mencari dukungan anggota parlemen agar para penyintas mendapat pengakuan dari legislatif. Aktivitas dan inisiatif tersebut menggambarkan bagaimana otoritas setempat masih merespon kebutuhan mereka, tapi bagaimanapun para penyintas tetap memiliki batas untuk terlibat dalam proses tersebut.

Sebagaimana permintaan penyintas tentang menyimpan kerahasiaan dan menyembunyikan identitas mereka, hal tersebut bisa di interpretasikan sebagai indikasi untuk tidak terlibat dalam proses legislatif⁷⁰. Diluar itu semua, sebuah organisasi masyarakat mampu membantu mereka. Selama ini penyintas tidak memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan dan partisipasi mereka tentang proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, langkah signifikan pertama yang bisa diambil oleh otoritas Kosovo adalah menjamin hak para penyintas dalam kerangka kerja legislatif untuk menyediakan penggantian rugi atas apa yang telah mereka alami selama konflik berlangsung⁷¹.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

Penyintas membutuhkan akses kesehatan di dalam Kosovo, bersama dengan penyediaan pendidikan dan kesempatan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, menyediakan keuntungan – keuntungan yang juga diberikan terhadap kelompok lain dapat mengurangi resiko mereka diidentifikasi sebagai korban kekerasan seksual⁷². Sementara itu, penyintas yang menjadi orang tua tunggal memiliki kebutuhan khusus berupa akses pendidikan dan jaminan kesehatan bagi anak – anaknya.

Beberapa penyintas merasa bersalah atas penderitaan yang mereka rasakan sehingga berdampak pada penurunan kapasitas untuk menyediakan masa depan lebih baik untuk anak – anak mereka⁷³. Menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi penyintas, sebagaimana anak mereka adalah korban tidak langsung atas konflik yang terjadi. Upaya tersebut sekaligus memberikan jaminan terhadap anak yang lahir dari kejahatan pemerkosaan.

Bagi Viki Jani, seorang penyintas, stigma pemerkosaan juga membawa kesulitan ekonomi yang cukup parah⁷⁴. Jani telah membesarkan anak perempuannya sendiri dan membayar biaya pendidikan dengan uang pensiun bulanan ibunya. *“Seperti banyak perempuan lain di Kosovo, saya diperkosa”* kata Jani. *“Suami saya meninggalkan saya, dia tidak ingin memiliki istri yang orang – orang akan menunjukinya dan berkata, ‘istrimu diperkosa.’ Jadi, saya membesarkan anak perempuan saya sendiri sekarang.”*

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ UN Women. 2017. *In Kosovo, legal recognition of war-time sexual violence survivors after 18 years*. Diakses dalam <https://reliefweb.int/report/serbia/kosovo-legal-recognition-war-time-sexual-violence-survivors-after-18-years>. Pada 04 Desember 2017.

Sejak 2006, tercatat banyak upaya untuk mendapatkan pengakuan hukum dan ganti rugi bagi korban kekerasan seksual selama konflik di Kosovo berlangsung⁷⁵. Viki Jani menuturkan harapannya tentang bantuan keuangan yang disertai reparasi agar dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anaknya. Selain dukungan psikososial, penyintas juga memerlukan dukungan material untuk memulihkan kehidupan mereka⁷⁶. Kondisi tersebut kemudian menyiratkan kebutuhan para penyintas khususnya perempuan terhadap sebuah pemberdayaan (*empowerment*).

4.3 Upaya Resolusi Konflik

Pasukan keamanan Kosovo yang dipimpin oleh NATO dan polisi internasional PBB gagal untuk melindungi kaum minoritas selama kerusuhan terjadi⁷⁷. Laporan *Human Right Watch* mendokumentasikan serangan yang meluas terhadap orang – orang Serbia dan minoritas lain yang tinggal di Kosovo gagal dibendung. Etnis Albania yang marah bertindak gegabah menyerang orang – orang Serbia, setidaknya 550 rumah dan 27 gereja Ortodoks dibakar⁷⁸.

Kekerasan tersebut dipicu oleh serangkaian peristiwa pembunuhan, pemerkosaan dan pengusiran paksa oleh pasukan keamanan Serbia dan Yugoslavia yang kemudian berimbas pada orang – orang Serbia yang tinggal di Kosovo. Katalis lainnya termasuk kemarahan etnis Albania atas penyerangan dan pembubaran demonstrasi terkait pembebasan Kosovo dari Serbia serta

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Human Right Watch*. 2004. *Kosovo: Failure of NATO, U.N. to Protect Minorities*. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2004/07/26/kosovo-failure-nato-un-protect-minorities>. Pada 09 November 2017.

⁷⁸ *Ibid.*,

penangkapan mantan pemimpin KLA (*Kosovo Liberation Army*) atas tuduhan kejahatan perang.

Melihat situasi tersebut, nyatanya *ethnic cleansing* tidak hanya berdampak pada orang – orang etnis Albania saja, melainkan balasan atas kampanye *ethnic cleansing* juga mempengaruhi kehidupan etnis minoritas yang tinggal di Kosovo termasuk etnis Serbia. Hal tersebut membuktikan bahwa kekerasan itu bersifat katalistik, menjadi penghantar bagi orang – orang yang mengalaminya, dan secara psikis, membalas kekerasan dengan kekerasan terkadang dapat membayar hutang emosi yang dirasakan. konflik yang terjadi atas tujuan penghapusan etnis tertentu (*ethnic cleansing*) dalam sebuah wilayah tidak bisa dianggap sebagai konflik sederhana antar kelompok. Melibatkan etnis dalam sebuah konflik berarti membawa konflik tersebut menjadi ingatan yang akan diteruskan dari generasi ke generasi.

Bicara mengenai *ethnic cleansing*, mulanya Resolusi PBB 1992 tentang *ethnic cleansing* hanya membicarakan bahwa perlakuan tersebut adalah sebuah rasa benci terhadap ras tertentu, dan hanya bersifat “*individually responsible*”, artinya tuntutan keadilan hanya akan dilimpahkan pada individu yang melakukannya saja. Namun, Resolusi tersebut dipertimbangkan ulang akibat pecahnya konflik di Bosnia dan Herzegovina. Pertimbangan itu akhirnya merubah pandangan baru bahwa *ethnic cleansing* menjadi salah satu bagian dari genosida⁷⁹. Resolusi PBB 1993 berbunyi;

“Condemns also the specific violations identified by the Special Rapporteur, most of which are committed in connection with ethnic cleansing by Bosnian Serbs, and which include killings, torture, beatings, arbitrary searches, rape,

⁷⁹ International Committee of Red Cross. *Practice Relating to Rule 129. The Act of Displacement: Section C. Ethnic cleansing*. Diakses melalui https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter38_rule129_sectionc. Pada 07 November 2017.

disappearances, destruction of houses, forced and illegal evictions, detentions and other acts or threats of violence aimed at forcing individuals to leave their homes.”⁸⁰

Dengan pernyataan tersebut, mempertegas bahwa praktik *ethnic cleansing* yang menargetkan *non – combatant* dianggap sebagai kejahatan perang dan pelanggaran atas hak asasi manusia. Melalui resolusi 1674 tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, Dewan Keamanan PBB kemudian menawarkan tindakan kolektif bagi dunia internasional untuk mengatasi fenomena genosida, *ethnic cleansing*, dan kejahatan kemanusiaan lain dengan mengadopsi apa yang disebut *Responsibility to Protect* (RtoP)⁸¹. Secara garis besar, RtoP merupakan jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana masyarakat internasional dapat bertanggung jawab untuk mendorong dan membantu negara lain melaksanakan tanggung jawab mereka dalam melindungi sebuah bangsa dari kejahatan genosida dan *ethnic cleansing*.

Selain mengajak tindakan kolektif dari dunia internasional, PBB juga secara spesifik memberikan mandat khusus. Melalui resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB pada tahun 1999 secara resmi mendirikan *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Pendirian UNMIK ditujukan untuk membentuk pemerintahan sementara bagi Kosovo, dimana warga sipil termasuk minoritas

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Christoph Mikulaschek. *The United Nations Security Council and The Responsibility to Protect: Policy, Process, and Practice*. hal. 20. Diakses melalui <http://responsibilitytoprotect.org/mikulaschek.pdf>. Pada 07 November 2017.

mendapatkan perlindungan dibawah PBB⁸². Selain itu, pendirian UNMIK juga dimaksudkan untuk mendukung proses perdamaian di Kosovo.

Keseluruhan mandat yang diberikan kepada UNMIK dimaksudkan untuk membantu memastikan kondisi kehidupan yang lebih damai bagi seluruh penduduk Kosovo dan memajukan stabilitas kawasan Balkan. Wewenang yang diberikan kepada UNMIK, kemudian menjadi perwujudan dari terminologi *An Agenda for Peace* yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal PBB tahun 1992, Bhoutros Ghali⁸³. Agenda tersebut berisikan tiga pilar pembentukan perdamaian meliputi *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* yang akan menjadi aktivitas utama bagi UNMIK di Kosovo.

Penulis tidak akan banyak membahas dua pilar perdamaian (*peacemaking* dan *peacekeeping*), yang kali ini akan penulis perdalam adalah mengenai *peacebuilding* yang dilakukan oleh UNMIK. Sebagaimana para penstudi Hubungan Internasional ketahui, bahwa setelah konflik dan intervensi militer dinyatakan selesai, salah satu agenda penting adalah melakukan rekonstruksi atau bisa disebut sebagai *security sector reform* (SSR). Dalam situasi pasca konflik, istilah rekonstruksi pada SSR merujuk pada pembenahan institusi pemerintahan yang absen terhadap perlindungan warga negaranya⁸⁴.

⁸² United Nations Mission in Kosovo. *Mandate*. Diakses dalam <https://unmik.unmissions.org/mandate>. Pada 07 November 2017.

⁸³ United Nations Secretary – General. 1992. *An Agenda for Peace*. Sesi 47. Diakses dalam <http://www.un-documents.net/a47-277.htm>. Pada 07 November 2017.

⁸⁴ Michael Brzoska dan Andrean Heinemann. *Security Sector Reform and Post-Conflict Reconstruction under International Auspices*. Chapter 6 hal 121. Diakses dalam <https://statebuildingmonitor.files.wordpress.com/2012/01/security-sector-reform-and-post-conflict-reconstruction-under-international-auspices.pdf>. Pada 09 November 2017.

UNMIK menjadi salah satu organ subsidier bentukan PBB yang memiliki tugas dan wewenang untuk mendukung aktivitas pembangunan, perdamaian, mengambil alih sementara pengembangan dan tata kelola institusi. Selain itu, UNMIK memiliki beberapa komponen pendukung yang tujuan utamanya untuk membangun masyarakat multi etnis yang berpedoman pada standard hak asasi manusia. Standard hak asasi manusia yang dimaksud adalah saling menghormati satu sama lain.

Meskipun perang di Kosovo tidak bisa dikatakan berjalan lama, tapi perang tersebut mengakibatkan kesusakan parah dalam aspek kemanusiaan, material, dan infrastruktur. Di akhir perang, ditemukan bahwa institusi pemerintahan dan penyedia keamanan publik di Kosovo sangat rapuh. Dalam menciptakan dan membangun kapasitas masyarakat multi etnis, yang kemudian bisa penulis sebut sebagai salah satu upaya SSR, tentu saja menjadi halangan cukup besar bagi Kosovo. Dalam beberapa aspek atau dimensi SSR di Kosovo, salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah DDR (*disarmament, demobilization, reintegration*)⁸⁵.

Perlu diketahui bahwa upaya DDR sudah dilakukan bersamaan dengan *peace agreements* yang sekaligus mengakhiri perang dengan pasukan keamanan Serbia dan Yugoslavia pada juni 1999⁸⁶. Penurunan jumlah personil KFOR (*Kosovo Force*) dari sebanyak 42.000 pada tahun 2001 menjadi 28.000 pada 2003 juga dilakukan menyusul meningkatnya kehadiran polisi lokal yang bertugas dalam rangka menjaga keamanan masyarakat.

⁸⁵ Bekim Baliqi. 2012. *Security Sector Reform in Kosovo: From institutional transitions to the democratic consolidation*. Diakses dalam <http://ssm.com/abstract=2421264>. hal 24. Pada 09 November 2017.

⁸⁶ Sebahate J. Shala 2015. *Demilitarization in Kosovo: A story of "success"*. Diakses dalam <https://cve-initiative.org/2015/10/05/demilitarization-in-kosovo-a-story-of-success/>. Pada 09 November 2017.

Pada awalnya, 8000 – 10.000, dan terakhir 25.732 pasukan keamanan terdaftar telah dimobilisasikan (*demobilization*). Dengan begitu tingkat kejahatan bisa ditekan secara perlahan tanpa ada paksaan dari pasukan keamanan. Hampir 10.000 senjata ringan, dan 5.5 juta amunisi mortar, senjata mesin, dan anti-tank berhasil dilucuti (*disarmament*). Melihat situasi yang kian lama kian termonitor dengan baik, Kosovo bisa semakin dekat dengan stabilitas negaranya⁸⁷.

Sebagai akhir dari proses *disarmament dan demobilization*, pasukan keamanan baru harus dibentuk. Pemimpin KLA (*Kosovo Liberation Army*) meminta dengan tegas agar pasukan lama KLA bisa dijadikan pasukan keamanan Kosovo yang baru⁸⁸. Benar saja, pada tahun 2000, KLA berubah menjadi *Kosovo Protection Corps* (KPC), sebuah organisasi masyarakat untuk menangani bencana dan keadaan darurat, serta menyediakan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, UNMIK mempercayakan pemilihan, rekrutmen dan pelatihan KPC untuk menjadi *International Organization of Migration*

Sebagaimana yang telah disepakati, bekas pasukan KLA diberikan kemudahan akses untuk masuk dalam KPC dan *Kosovo Police Service* (KPS)⁸⁹. Proses untuk *reintegration* para pasukan lama KLA kedalam kehidupan sosial masyarakat penulis nilai sebagai pelengkap tahapan *disarmament dan demobilization*. Mengapa demikian? Karena DDR merupakan satu kesatuan dimana ada genjatan senjata, maka upaya selanjutnya adalah membantu bekas pasukan menjadi bagian dari masyarakat sipil.

⁸⁷ Jean Christian Cady. *The United Nations and Security Sector Reform in Kosovo*. diakses dalam <https://www.un.org/ruleoflaw/files/Cady.pdf>. Pada 09 November 2017.

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ *Ibid.*,

Sementara memastikan proses DDR berjalan dengan baik, membangun kapasitas masyarakat menuju masyarakat multi etnis yang berpedoman pada hak asasi manusia merupakan hal penting bagi Kosovo saat itu. Upaya *Security sector reform* harus dipahami secara luas, tidak hanya memperbaiki dan membuat institusi pada sektor keamanan saja, tapi juga fokus pada efisiensi pembangunan negara yang tujuan utamanya mewujudkan pemerintahan demokrasi dan warga negara yang saling menghormati satu sama lain.

4.4 Kebutuhan terhadap *Socioemotional Reconciliation*

Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab rekonsiliasi dimana menjelaskan gambaran mengenai konsep *socioemotional reconciliation*. Pada sub bab kali ini penulis akan menjabarkan secara singkat bagaimana *socioemotional reconciliation* akan menjadi kebutuhan rekonsiliasi di Kosovo, antara etnis Albania dan etnis Serbia. Kebutuhan tersebut berdasarkan dari sejarah dan dampak konflik yang nantinya akan penulis elaborasikan dengan keterlibatan *Kosovo Women's Network*. Berikut adalah beberapa kondisi yang menjadi alasan mengapa Kosovo harus merekonsiliasi hubungan *inter ethnic*.

Kondisi pertama dimulai dari peninggalan Marshal Tito yang sempat memberikan Kosovo sebuah otonomi sendiri dan keinginan Slobodan Milosevic mengenai *The Greater Serbia* yang membuat etnis Albania dan Serbia mengalami benturan kepentingan. Sejak saat itu, hubungan kedua etnis tidak berjalan dengan baik. Seharusnya Kosovo menjadi satu – satunya negara yang memiliki hubungan antar etnis paling baik di Kawasan Balkan Barat⁹⁰, namun

⁹⁰ World Population Review. *Kosovo Population*. 2017. Diakses dalam <http://worldpopulationreview.com/countries/kosovo-population/>. Pada 26 November 2017

pada tahun – tahun berikutnya tekanan yang menimpa etnis Albania semakin memburuk.

Keputusan Ibrahim Rugova untuk membentuk pemerintahannya, membangun perekonomian dan sistem layanan sosial sendiri untuk etnis Albania semakin mempertebal dinding pembatas dengan etnis Serbia. Implementasi gabungan yang disepakati oleh Slobodan Milosevic dan Ibrahim Rugova dalam sistem pendidikan juga tidak berjalan dengan baik di Kosovo, justru membuat tensi antara kedua pihak tidak semakin membaik. Ketidakpuasan terhadap mekanisme yang berjalan membuat masyarakat etnis Albania mengambil perannya menggunakan pendekatan yang lebih tegas.

Rencana penyerangan yang dilakukan *Kosovo Liberation Army* (KLA) terhadap Serbia menjadi titik dimana integrasi kedua etnis dalam kehidupan kenegaraan di Kosovo semakin kabur. Tidak berhenti disitu, serangan yang meluas terhadap orang – orang Serbia dilakukan sebagai inisiatif balas dendam atas apa yang dilakukan Serbia terhadap etnis Albania, khususnya perempuan dan anak – anak semakin memperburuk hubungan keduanya. Akumulasi perseteruan tersebut kemudian menyebabkan runtuhnya integrasi antara etnis Albania dan Serbia di Kosovo.

Berdasarkan dari keadaan itu, maka penulis menganggap bahwa *socioemotional reconciliation* akan menjadi alat yang tepat dalam melihat dinamika rekonsiliasi di Kosovo. *Socioemotional reconciliation* merupakan konsep yang tujuannya dapat menciptakan lingkungan bebas konflik dimana dua pihak yang terpisah akan membentuk satu unit sosial yang menghasilkan sebuah penggabungan identitas (*integration*). Penulis menilai bahwa saat ini,

Kosovo membutuhkan upaya – upaya yang membuat etnis Albania dan Serbia dapat hidup berdampingan sebagai warga negara Kosovo.

BAB V

PEMBAHASAN

Kesiapan Penyintas *Ethnic Cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation* Konflik Kosovo dan Serbia Tahun 2008-2016

5.1 *Kosovo Women's Network* sebagai Jejaring antar Penyintas

Kosovo adalah negara yang tidak asing lagi dengan istilah memperjuangkan hak. 17 Februari 2008, menjadi momen dimana Parlemen Kosovo mengumumkan kemerdekaan mereka dari Serbia. Selama masa pencarian kedaulatan dari negara lain, Kosovo menempatkan politik domestiknya terlalu berfokus pada pengakuan dengan mengabaikan isu – isu lain yang muncul¹. Isu utama yang terlewat adalah menangani korban pemerkosaan selama perang Kosovo berlangsung. Tercatat ribuan perempuan diperkosa selama perang, namun elit politik Kosovo enggan mengakui korban dan hak – hak mereka².

Perempuan di Kosovo ditingalkan menanggung beban stigma sosial yang berlaku di masyarakat setelah perang terjadi. Baru pada tahun 2011, undang – undang untuk menangani hak – hak korban perang diperkenalkan, dan menyediakan penggantian dana keuangan bagi perempuan yang telah terbukti menjadi korban³. Namun lebih dari itu, kurangnya pemenuhan hak untuk menghukum pelaku masih meninggalkan rasa malu bagi korban pemerkosaan. Sayangnya, kekerasan dalam rumah tangga menjadi fenomena

¹ Iliriana Fteja. 2017. *Women's Rights in Kosovo*. Diakses dalam <https://porridgemagazine.com/2017/09/19/womens-rights-in-kosovo-iliriana-fteja/>. Pada 11 November 2017.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

global yang tidak terkecuali menimpa keluarga di Kosovo, yang turut menambah beban bagi penyintas.

Masih bersinggungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kasus yang dapat menjelaskan kaitanya dengan para penyintas adalah insiden Zejnepe Bytyci Berisha, korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencari pertolongan polisi sebelum dia ditikam sampai mati oleh suaminya sendiri. Insiden Berisha menjelaskan kurangnya kemajuan masyarakat dan kebijakan Kosovo dalam memenuhi kebutuhan penyintas. Mereka menganggap itu adalah kejadian yang wajar terjadi bila seorang istri diduga berselingkuh. Sikap dan stigma masyarakat yang seperti itu digunakan untuk membenarkan tindakan pelaku. Realitanya, Kosovo telah kembali pada kejahatan perang di tahun 90an, terutama ketika melihat perempuan korban pemerkosaan dibunuh⁴.

Kosovo Women's Network (KWN) dibentuk untuk melakukan penelitian, melaporkan, mendampingi, mengenalkan warga Kosovo tentang bagaimana pendekatan *gender based violence*. Hukum dan kebijakan di Kosovo telah diatur sedemikian rupa untuk menangani permasalahan tersebut, masalahnya ada pada penerapannya⁵. Pemerintah dianggap lamban menangani masalah korban pemerkosaan. Seringkali korban ragu untuk mengungkapkan pemerosaan mereka kepada pasangan karena sebagian besar akan menyalahkan karena membuat malu keluarga.

Sejak permulaan itu, KWN berkembang menjadi jejaring yang mengadvokasi kepentingan perempuan – perempuan Kosovo, baik lokal,

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

regional, maupun di level internasional⁶. Dilihat dari segi *women's rights organizations*, KWN memiliki peran penting dalam proses perubahan sosial. Mereka melihat hak perempuan sebagian dari hak asasi manusia dan menyediakan pelayanan untuk perempuan yang termarginalisasi akibat absennya pemerintah Kosovo dalam hal itu⁷.

Penyebab hal tersebut adalah kehadiran UNMIK dan otoritas Kosovo yang masih menjalankan pemerintahan Kosovo secara bersama, dinamika politik yang belum stabil masih menyisakan resiko bagi otoritas Kosovo untuk menjalankan pemerintahannya dengan mandiri. Hal ini membuat penyediaan kebutuhan atas perempuan semakin sulit. Namun setelah kemerdekaan berhasil di deklarasikan, keadaan berubah dan KWN perlahan mendapatkan akses terhadap institusi melalui advokasinya sehingga mampu memasukkan kebutuhan perempuan dalam draft legislatif⁸.

KWN bekerja bersama kelompok – kelompok perempuan di Kosovo baik secara formal maupun informal. Sampai pada tahun 2008, KWN mengadakan *survey* cukup luas yang kemudian menghasilkan data bahwa 43% responden pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, dan lebih dari 46% dari keseluruhan perempuan menderita atas kekerasan tersebut⁹. Banyak tantangan untuk mengatasi hal tersebut, sebagai respon, KWN selalu aktif dalam menyelenggarakan kampanye – kampanye yang bertujuan untuk mengedukasi warga Kosovo agar sadar akan hak orang lain.

⁶ Kosovo Women's Network. 2017. *About Us*. Diakses dalam <http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=3>. Pada 11 November 2017.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

“Violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention of the full advancement of women, and that violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men”. (Farnsworth, et. al)

Mampu menempatkan perempuan dalam peran sosial yang kuat dan membangun lingkungan dimana mereka dapat membela haknya dapat mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan dan laki – laki sudah semestinya saling berbagi atau mendistribusikan secara merata kekuasaan di berbagai bidang. Menempatkan perempuan pada posisi yang kuat juga dapat mengubah persepsi penyintas dalam memandang dirinya

5.2 Kesiapan penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam *Socioemotional Reconciliation*

Perbedaan secara sifat dari konflik antar kelompok membuat rekonsiliasinya semakin kompleks bila dibandingkan dengan rekonsiliasi antar personal. Tidak seperti kebanyakan konflik antar personal yang cenderung melakukan kekerasan fisik, ketika konflik antar kelompok tereskalasi (memuncak), mereka akan mengasosiasikan konflik tersebut dengan penderitaan akibat kematian, dan pasti ada kehancuran yang dirasakan salah satu pihak yang berkonflik. Lebih dari itu, konflik antar kelompok juga melibatkan kekerasan struktural dalam bentuk diskriminasi antar kelompok¹⁰.

¹⁰ Arie Nadler. 2012. *Intergroup Reconciliation: Definitions, Processes, and Future Directions*. hal 293. Diakses dalam https://www.researchgate.net/profile/Arie_Nadler/publication/288545402_Intergroup_Reconciliation_Definitions_Processes_and_Future_Directions/links/56f4febe08ae7c1fda2d8e0b/Intergroup-Reconciliation-Definitions-Processes-and-Future-Directions.pdf?origin=publication_detail. Pada 13 November 2017.

Rekonsiliasi yang akan penulis gunakan adalah *Socioemotional Reconciliation* dimana prosesnya akan lebih relevan apabila digunakan dalam melihat konflik antar kelompok yang ditandai dengan adanya episode kekerasan yang melibatkan penghinaan, kematian, dan kehancuran didalamnya¹¹. Proses rekonsiliasi disini adalah upaya untuk memperbaiki identitas yang selama ini dirasakan sebagai konsekuensi dari menjadi *victim* (korban) dan *perpetrators* (pelaku) selama episode konflik berlangsung¹².

Sederhananya, korban akan merasakan penghinaan atas dirinya, merasa inferior dan tidak bisa melakukan apa – apa karena selalu diperlakukan buruk dan ditekan keberadaannya oleh pelaku. Sebaliknya, pelaku akan merasa bahwa dirinya adalah aktor yang tidak memiliki moral, untuk memperbaiki itu, dirinya bisa menjauh dari tanggung jawab, atau berusaha membuat sejarah baru agar sejarah konflik sebenarnya bisa dibelokkan. Dari penjelasan singkat tersebut, dalam sub bab kali ini penulis akan membahas mengenai metode rekonsiliasi yang penulis tentukan sebelumnya (*socioemotional reconciliation*) dengan bantuan indikator – indikator didalamnya untuk kemudian bisa menganalisa fenomena konflik antar etnis Albania dan Serbia.

5.2.1 *The Unilateral Alternative: Revenge and Social Distancing*

Socioemotional Reconciliation menjadi konsep yang berangkat dari sebuah ancaman. Korban mengalami ancaman terhadap identitas mereka sebagai *powerful actors*, sedangkan pelaku mengalami ancaman terhadap identitas sebagai *moral actors* . Kedua identitas tersebut kemudian

¹¹ *Ibid.*, hal 298.

¹² *Ibid.*,

membangkitkan perasaan tidak berdaya dan inferioritas moral. Untuk menghindari perasaan tersebut dan memperbaiki identitas yang terancam, mereka akan menggunakan cara sepihak (*Unilateral Alternative*), yaitu dengan melakukan balas dendam (*revenge*) dan menjauh dari tanggung jawab (*social distancing*).

Revenge

Para peneliti menggunakan istilah *victim* (korban/penyintas) untuk menjelaskan kurangnya kontrol dan hilangnya kekuasaan atas diri seseorang dalam hubungan dua pihak yang berkonflik¹³. Untuk mengatasi ancaman tersebut, korban perlu untuk mengembalikan perasaan akan penghargaan diri, kontrol diri, dan kesetaraan sosial. Selama episode kekerasan berlangsung, etnis Albania selalu menjadi tujuan strategis pasukan keamanan Serbia sebagai instrumen perangnya.

“Women weren’t protected from violence even for one moment. In Kosovo, they say, thousands of women were raped, but nothing is known for sure” – Nora Ahmetaj,

Kalimat yang penulis kutip dari Nora Ahmetaj, Direktur Pusat Studi Dokumentasi dan Publikasi *Human Right Watch* berdasar kesaksian korban perang¹⁴. Keseluruhan laporan kekerasan seksual dari *Human Right Watch*

¹³ Arie Nadler, Thomas E. Malloy, Jeffrey D. Fisher. 2008. *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. hal 46. Diakses dalam http://libgen.io/get/08F146E451E114B32CD4F4820BE3B3BA/Arie%20Nadler%2C%20Thomas%20Malloy%20and%20Jeffrey%20D.%20Fisher%20%28eds.%29-Social%20Psychology%20of%20Intergroup%20Reconciliation_%20From%20Violent%20Conflict%20to%20Peaceful%20Co-Existence-Oxford%20University%20Press%2C%20USA%20%282008%29.pdf. Pada 13 November 2017.

¹⁴ Kosovo Women’s Network. 2011. *1325 Facts & Fables; A collection of stories about the implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security in Kosovo*. hal 81. Diakses dalam <http://www.womensnetwork.org/documents/20130120165559661.pdf>. Pada 13 November 2017.

semakin menegaskan bahwa pemerkosaan telah digunakan sebagai senjata dari kampanye “*ethnic cleansing*” di Kosovo. Pemerkosaan bukan lagi kejahatan yang dilakukan secara individual, namun telah menjadi sebuah instrumen teror yang sekaligus bertujuan mengambil kontrol atas korban yang mayoritas adalah perempuan – perempuan etnis Albania.

Kejahatan tersebut sudah semestinya mendapat hukuman yang setimpal, orang – orang yang melakukannya juga harus diadili dengan benar. Mereka selama ini menunggu keadilan di tegakkan, dan sampai laporan ini dibuat pada 2011, tidak ada sama sekali dakwaan atas kejahatan seksual yang menimpa para korban¹⁵. Semakin cepat investigasi dilakukan dan tuntutan dipenuhi, semakin cepat pula para korban bisa mendapatkan penghargaan diri sebagai dasar membangun kembali kehidupan yang lebih baik untuk mereka.

Kehilangan kesetaraan sosial kiranya telah tergambar dalam salah satu upaya resolusi konflik yang di inisiasi oleh UNMIK dan OSCE. Dalam resolusi tersebut, tidak ada satupun perwakilan aktivis atau kelompok perempuan yang diundang karena mayoritas masyarakat Kosovo masih kental akan paham patriarki¹⁶. Marginalisasi tersebut telah membuat para perempuan semakin merasa hilang posisinya dalam kesetaraan sosial, terutama dalam aspek – aspek politik dan kepemimpinan.

Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan tingkat kesetaraan partisipasi perempuan didalam beberapa institusi vital di Kosovo;

Tabel 5.1. Partisipasi perempuan dalam ICTY

Position	Women	Men	% Women
ICTY staff overall	448	456	50%
Presidents	1	6	14%
Vice Presidents	2	4	33%
Current permanent judges	2	14	13%
Prior permanent judges	6	25	19%
Current Ad Litem Judges	4	5	44%
Former Ad Litem Judges	10	15	40%
Prosecutors (all)	2	3	40%
Deputy prosecutors (all)	0	3	0%

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hal 20.

Tabel 5.2. Partisipasi perempuan dalam misi – misi luar negeri

Year	Women	Men	% Women
2008	3	17	15%
2009	13	59	18%
2010	13	59	18%
2011	13	59	18%

Tabel 5.3. Partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan

Position	Women	Men	% Women
Presidents	1	5	16.7%
Prime Ministers	0	6	0.0%
Deputy Prime Ministers (2011)	2	4	33%
Ministers (2011)	2	17	10.5%
Prime Minister's Office (2007)	46	102	31.1%
Deputy Ministers (2011)	0	33	0.0%
Foreign missions	13	59	18.1%
All institutions (2007)	6,013	10,711	36.5%

Sebenarnya, dalam institusi Kosovo, kesetaraan *gender* adalah sebagai nilai fundamental. Hukum di Kosovo telah mempertimbangkan kesetaraan tersebut bisa dicapai ketika partisipasi perempuan dapat mencapai 40% presentase dalam semua institusi¹⁷. Meskipun sulit melihat 40% perempuan banding 60% laki – laki adalah setara, tapi pertimbangan tersebut menjadi

¹⁷ *Ibid.*,

sebuah pencapaian cukup besar melihat negara – negara Eropa lain masih menerapkan presentase partisipasi antara 30-40% saja.

Data dari tabel 5.1 sampai 5.3 yang penulis sediakan memperlihatkan bahwa dalam beberapa posisi, perempuan masih diberikan tempat untuk mewakili kepentingan mereka. Namun, meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam setiap level perpolitikan Kosovo memang penting, tapi tidak cukup hanya sampai disitu. Salah satu kritik mengatakan “*bisa unggul dalam angka tidak selalu membawa kualitas*”¹⁸, maksudnya adalah tidak semua perempuan yang diberikan tempat memiliki akuntabilitas dan kapasitas yang baik untuk mewakili suara – suara perempuan Kosovo.

Cara selain peningkatan partisipasi adalah korban bisa mengembalikan identitasnya sebagai seorang yang punya kendali atas dirinya dengan upaya balas dendam (*revenge*) terhadap pelaku. Balas dendam akan merubah ketimpangan kekuasaan (*power asymmetry*) yang selama ini terjadi dan membuat hubungan antar keduanya menjadi lebih setara. Beberapa upaya balas dendam terlihat dalam serangan yang meluas terhadap orang – orang Serbia dan minoritas lain yang tinggal di Kosovo. Etnis Albania yang marah bertindak gegabah menyerang orang – orang Serbia, setidaknya 550 rumah dan 27 Gereja Ortodoks dibakar¹⁹.

Setelah pasukan keamanan Serbia dan Yugoslavia menarik diri dari Kosovo, para pengungsi kembali dari Macedonia dan Albania. Namun, bagi beberapa kelompok minoritas di provinsi tersebut, terutama masyarakat etnis

¹⁸ *Ibid.*, hal 59

¹⁹ Human Right Watch. 2004. *Kosovo: Failure of NATO, U.N. to Protect Minorities*. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2004/07/26/kosovo-failure-nato-un-protect-minorities>. Pada 14 November 2017.

Serbia dan Roma, mereka dianggap sebagai lawan politik tentara pembebasan Kosovo (KLA). Gelombang pembakaran dan penjarahan rumah – rumah etnis Serbia dan Roma, pelecehan dan intimidasi terjadi di seluruh Kosovo. *Human Right Watch* menjelaskan bahwa pelanggaran ini dimaksudkan sebagai upaya balas dendam yang berasal dari keinginan beberapa etnis Albania²⁰.

Setiap pemahaman tentang upaya balas dendam ini dimulai dari memori kekejaman pasukan keamanan Serbia yang menyerang etnis Albania di Kosovo, terutama perempuan yang menjadi korban pemerkosaan massal. Kebrutalan dan kejahatan perang sistematis telah menciptakan sebuah wadah kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Para peneliti *Human Right Watch* menemukan banyak orang – orang Albania di Kosovo sangat pesimis mengenai kemungkinan masa depan untuk hidup berdampingan secara damai dengan minoritas Serbia di Kosovo²¹.

Meskipun secara psikologis, membalas dendam dapat membawa ketenangan untuk korban, hal tersebut bukanlah sebuah upaya kontribusi untuk mengakhiri konflik, karena merupakan tindakan sepihak yang alami terjadi. Balas dendam menjadi upaya dari korban untuk mengembalikan sekaligus menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kembali kontrol dan kekuasaan atas dirinya, tapi hal tersebut akan menjadi kekerasan yang terus berulang (*cycle of violence*) dan membuat rekonsiliasi semakin jauh untuk di capai.

Banyak faktor yang kemudian membuat korban selalu ingin meluapkan rasa marahnya dengan balas dendam. Adanya *gender gap* ditambah kejadian

²⁰ Human Right Watch. 1999. *Federal Republic of Yugoslavia; Abuse Against Serbs and Roma in the New Kosovo*. diakses dalam <https://www.hrw.org/reports/1999/kosov2/>. Pada 14 November 2017.

²¹ *Ibid.*,

pemeriksaan massal membuat partisipasi perempuan di Kosovo semakin termarginalkan. Keadilan yang belum ditegakkan dan tuntutan korban atas ganti rugi selama perang berlangsung juga belum sepenuhnya dilaksanakan.

Melalui tulisannya, Marigold Best dan Pamela Hussey menjelaskan bahwa perempuan korban kekerasan dalam perang tergambar sebagai seseorang yang tidak punya harapan lagi²². Dalam situasi perang apapun, perempuan dan anak - anaknya selalu diidentifikasi sebagai korban. Para suami yang terbunuh kemudian meninggalkan istri dengan tanggung jawab besar untuk menghidupi seluruh keluarganya, belum lagi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mereka dan stigma yang membebani hidupnya.

Jika para perempuan tersebut hidup dengan membawa derita masa lalu, bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam membangun perdamaian dalam masyarakat? Best dan Hussey menemukan celah tersebut dengan melihat peran perempuan sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga²³. Beberapa upaya rekonsiliasi yang pernah dilakukan juga menunjukkan bahwa peran konsiliator di Kosovo sering diwariskan dari orang tua ke anak dalam sebuah keluarga²⁴. Jadi, penting kemudian bagi perempuan untuk sadar akan peran pentingnya dalam keluarga sebelum keluar ke ranah yang lebih luas.

“There is no handy roadmap for reconciliation. There is no shortcut or simple prescription for healing the wounds and divisions of a society in the aftermath of sustained violence. Creating trust and understanding between former

²² Elisabeth Porter. 2007. *PEACEBUILDING: Women in International Perspective*. hal. 8. Diakses dari http://libgen.io/get/E410D4C617BEDC57D6FBF5AFFFA93DC6/Elisabet%20Porter-Peacebuilding_%20Women%20in%20International%20Perspective%20%282007%29.pdf pada 14 November 2017.

²³ *Ibid.*, hal. 11

²⁴ Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. *Serbia: Blood Feuds carried out by ethnic Albanians; state protection and support services available to victims of blood feuds; instances of prosecution for blood-feud related crimes*. 2014. Diakses dalam <http://www.refworld.org/docid/538c43a54.html>. Pada 14 November 2017.

enemies is a supremely difficult challenge. It is, however, an essential one to address in The process of building a lasting peace.” – Desmond Tutu –

Dalam banyak cara, menghindari perasaan untuk balas dendam dapat diwujudkan mulai dari komponen paling sederhana, yaitu keluarga, atau dengan membuka dialog antar kelompok yang berkonflik, membentuk hubungan yang adil, dan saling mengenali perbedaan. Lebih idealnya lagi jika ditambah dengan saling memaafkan dan dimaafkan. Namun realita penyelesaian konflik antar kelompok lebih kompleks. Dari yang penulis jelaskan, baru salah satu indikator yang dapat mengantarkan pihak yang berkonflik menuju “*willingness to reconcile*”.

Social Distancing

Berbeda halnya dengan perasaan korban, pelaku (*perpetrators*) yang memegang kendali atas korban selama episode konflik berlangsung tidak mengalami ancaman yang sama seperti yang dirasakan oleh korban²⁵. Disisi lain, pelaku akan khawatir terhadap gambaran dirinya sebagai aktor sosial yang tidak bermoral. Ancaman tersebut menghasilkan perasaan bersalah, malu, dan menimbulkan inferioritas moral²⁶. Kumpulan emosi dan perasaan tersebut kemudian diasosiasikan pelaku dalam ketakutan bahwa mereka akan ditolak dalam komunitas yang lebih luas.

Pelaku dapat menghilangkan ancaman terhadap identitas mereka dengan menyangkal konsekuensi menyakitkan atau menghindar dari tanggung jawab (*denying the painful consequences*) atas apa yang telah mereka perbuat²⁷.

²⁵ Arie Nadler, Thomas E. Malloy, Jeffrey D. Fisher. *Loc cit.*, hal 46

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, hal 47

Mereka dapat menjauh dari rasa bersalah atau dengan menghilangkan empati terhadap penderitaan korban. Praktik ini biasa terjadi dalam *intractable conflict* yang memperbolehkan salah satu pihak untuk tidak ber empati terhadap korban. Sebagai alternatif dari tindakan *unresponsble*, pelaku bisa menyatakan bahwa korban sendiri yang menginginkan untuk berkonflik, jadi penderitaan pasca perang bukan menjadi satu – satunya kesalahan pelaku.

Seperti halnya tindakan balas dendam (*revenge*) yang coba dilakukan korban untuk mengembalikan identitasnya sebagai *powerful actors*, menjauh dari tanggung jawab menjadi salah satu cara pelaku untuk mengembalikan identitasnya sebagai *moral actors*. *Revenge* dan *Social Distancing*, keduanya merupakan cara sepihak dimana korban dan pelaku bisa merasa lebih baik, namun sama sekali tidak mencerminkan nilai – nilai rekonsiliasi. Dalam sub bab kali ini penulis akan menjelaskan beberapa data yang ditemukan berdasarkan pada tindakan – tindakan Serbia yang menunjukkan indikasi dalam rangka menghindari tanggung jawabnya terhadap etnis Albania.

Dalam sebuah artikel berita, penulis menemukan penuturan salah satu korban mengenai pandangannya terhadap upaya rekonsiliasi dengan Serbia. Nesrete Kumnova adalah seorang ibu yang kehilangan putra akibat penculikan oleh pasukan Serbia selama perang Kosovo. Putranya hanyalah satu dari 1.904 orang Kosovo yang terdaftar oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang masih hilang²⁸. Sampai dia tau apa yang terjadi pada anaknya, betapapun menyakitkan kebenaran itu, Kumnova tidak akan bisa hidup dengan

²⁸ Elira Canga. 2011. *Uncomfortable Truth: War Crimes in the Balkans*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/uncomfortable-truths-war-crimes-in-the-balkans>. Pada 16 November 2017.

damai bersama orang Serbia, apalagi jika harus memaafkan. Kumnova merasa rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan, kecuali jika luka para korban bisa disembuhkan²⁹.

Anak laki – laki Xyafer Velu yang berusia 13 tahun, Shyqyri ditangkap dan dibunuh oleh Pasukan Serbia pada tahun 1999, namun tubuhnya baru ditemukan enam tahun kemudian³⁰. Sekarang, seperti banyak kerabat korban lain masa perang di Kosovo, Velu percaya bahwa Serbia harus melakukan langkah pertama menuju rekonsiliasi dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada etnis Albania atas apa yang telah mereka perbuat. Velu mengatakan bahwa belum bisa memaafkan kecuali Serbia meminta maaf dan semua pelaku kejahatan selama perang dibawa ke pengadilan untuk menerima hukumannya³¹.

Sementara itu fakta yang harus diterima adalah, pada tahun 2006, Slobodan Milosevic, mantan orang nomor satu yang dituduh sebagai dalang setiap perintah pembunuhan dan pemerkosaan telah meninggal dunia. Kematian Milosevic membawa terdamparnya upaya untuk mengakhiri proses kejahatan perang yang oleh banyak orang dianggap penting untuk penegakan keadilan. Dengan kematiannya, pertanyaan tentang kesalahan hukum para petinggi Serbia lain atas kekejaman yang paling brutal di Eropa sejak Perang Dunia II akan tetap tidak terjawab³².

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Edona Peci. 2013. *Kosovo War Victims Not Ready for Serbia Reconciliation*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-victims-not-ready-to-reconcile-with-serbia>. Pada 17 November 2017.

³¹ *Ibid.*,

³² Michael Farquhar dan Janet Anderson. 2007. *Serb Leader's Death "Tragic for Victims"*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/serb-leader-s-death-tragic-for-victims>. Pada 17 November 2017.

Upaya tidak berhenti sampai disitu, Pemerintah di Pristina mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menangani permasalahan di masa lalu dan berdamai dengan Serbia. Namun menginginkan agar Pemerintah di Belgrade meminta maaf atas kejahatan yang dilakukan di Kosovo sebelum proses rekonsiliasi dilakukan. Rekonsiliasi adalah sebuah proses yang akan memakan waktu lama, dan karena itu memerlukan lingkungan yang mengakomodasi semua ranah dalam masyarakat yang menderita dibawah rezim masa lalu.

Wakil Perdana Menteri, Hajredin Kuci mengatakan bahwa sebagian besar hambatan dalam proses rekonsiliasi berasal dari Serbia, yang terus bertindak agresif terhadap otoritas dan kedaulatan Kosovo³³. Serbia dirasa perlu untuk terlebih dahulu mengakui kedaulatan Kosovo, integritas teritorial negara, paling tidak mengutarakan permintaan maafnya sebagai satu - satunya tindakan bermoral. Karena selama ini, tindakan Serbia membuat rekonsiliasi antar etnis sulit untuk diwujudkan.

Kesiapan Pemerintah di Pristina disusul oleh tuntutan *Kosovo Women's Network* tentang "*Justice and Dignity before Negotiations*"³⁴. Lebih dari 1.000 orang berpartisipasi dalam protes yang di inisiasi oleh *Kosovo Women's Network*, sejak saat itu, setidaknya 5.700 orang telah menandatangani sebuah petisi dengan permintaan yang sama; sebuah permintaan maaf dari Serbia atas kejahatan yang telah dilakukan selama perang Kosovo 1998-1999, mengembalikan kerabat yang masih hilang, keadilan untuk korban, dan

³³ Fatmir Aliu. 2012. *Kosovo: Serbia Should Apologise for its Crimes*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-serbia-to-apologize-for-the-crimes-it-committed>. Pada 17 November 2017.

³⁴ Kosovo Women's Network. 2012. *Citizens Demonstrate for Justice and Dignity; 5.700 Sign Petition*. Diakses dalam <https://www.womensnetwork.org/documents/20130405133621338.pdf>. Pada 17 November 2017.

kompensasi ekonomi atas hancurnya kesempatan korban untuk melanjutkan hidupnya.

Direktur Eksekutif *Kosovo Women's Network*, Igbalee Rugova menyatakan bahwa Serbia berhutang pada orang – orang etnis Albania. Sebuah keadilan tidak dicapai hanya melalui negosiasi, terdapat beberapa konsidi yang harus dipenuhi, yaitu permintaan maaf dan keadilan bagi penjahat perang. Dengan ini *Kosovo Women's Network* bersama seluruh etnis Albania yang terlibat meminta keadilan, dan pengembalian martabat dari pemerintah dan institusi internasional. Salah seorang etnis Albania menyerukan “selama Serbia masih tidak mengakui apa yang telah mereka lakukan, dan selama Serbia tidak mengaku kepada publik, kita tidak memiliki alasan apapun untuk bernegosiasi.”

Berikut merupakan salah satu deklarasi dari *Kosovo Women's Network* dalam tuntutanannya kepada Pemerintah Serbia di Belgrade;

“Kami adalah orang – orang yang sejarahnya terlupakan dan ditekan oleh aktor internasional, dan lebih menyakitkan lagi oleh pemimpin kami sendiri”

“Kami adalah pria dan wanita, anak gadis dan laki – laki yang lebih dari 10 tahun ini berpartisipasi dalam perdamaian, tergabung dalam perlawanan sipil dengan mimpi dapat hidup dalam demokrasi, dimana suara kami dapat didengar dan hak kami dapat dilindungi”

“Kami adalah orang – orang yang melihat hak kekayaan kami diambil dan negara menolak untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi atas kami”

“Kami adalah generasi muda yang ditolak haknya untuk berpendidikan, menyebabkan turunnya kemampuan kami mendapat pekerjaan”

“Kami adalah populasi yang ditolak haknya untuk berkerja, mendapat kesehatan dan menyampaikan pendapat”

“Kami adalah keluarga dari 1.765 orang yang hilang sejak perang 1998-1999, yang menangis berharap mereka bisa ditemukan”

“Kami adalah keluarga dari penduduk tidak bersalah yang terbunuh selama perang; kami adalah korban dari kejahatan perang Serbia”

“Kami adalah saudara, ibu, dan ayah dari ribuan perempuan dan anak gadis yang diperkosa, dijadikan senjata perang, yang dilakukan oleh militer Serbia, dan yang belum mendapat permintaan maaf”

Perwakilan dari *International Civilian*, Pieter Feith, mengatakan bahwa Kosovo masih Jauh dari proses Rekonsiliasi, karena kenangan buruk terhadap perang masih menempel dalam benak para korbannya³⁵. Namun, rekonsiliasi tetap harus ditawarkan kepada tiap – tiap individu, mereka yang akan memutuskan sendiri apakah mereka ingin menghadapi masa lalu atau tidak. Feith kemudian memuji inisiatif pemerintah untuk tetap mengupayakan rekonsiliasi meskipun prosesnya tidaklah mudah.

Sampai saat penelitian ini dibuat, dua kandidat utama dalam kampanye pemilihan Presiden Serbia yang memainkan peran kontroversial selama masa perang, dan salah satu dari mereka masih diadili karena keterlibatannya dalam perang tersebut menghindari isu perang yang menyakitkan³⁶. Hal ini karena para kandidat tidak menganggap masalah keadilan pasca perang sebagai sesuatu yang penting, justru dikhawatirkan akan menurunkan elektabilitas mereka di Serbia.

³⁵ Fatmir Aliu. *Loc., cit*

³⁶ Vanja Djuric. 2017. *Serbian Presidential Candidates Avoid “Painful” War Issues*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-presidential-candidates-avoid-painful-war-issues-03-17-2017>. Pada 17 November 2017.

Melihat situasi seperti ini, dipertimbangkan dari realitas hubungan antara Kosovo dan Serbia, proses rekonsiliasi tidak akan berjalan dengan mudah. Tidak pula bisa mengharapkan hasil yang cepat, karena bisa memakan waktu sampai beberapa generasi. Seperti yang dikatakan Pieter Feith, “*Victims remain victims, the past cannot be undone, and the truth needs to be told*,”. Menyaksikan kenyataan bahwa keadilan masih belum sepenuhnya ditegakkan, perjuangan warga Kosovo terlihat masih panjang. Sepakat dengan perkataan Feith, kebenaran perlu untuk diceritakan.

Untuk itu, penulis berusaha menemukan upaya dari para penyintas tidak hanya dalam tuntutan terhadap proses pengadilan pelaku, tapi juga upaya dalam membuat kebenaran tetap terjaga untuk bisa diceritakan dari generasi ke generasi sampai tanggung jawab Serbia atas korban dipenuhi, dan rekonsiliasi dapat dicapai. Memang benar menuntut agar tanggung jawab pelaku bisa dipenuhi, tapi bila tanggung jawab tersebut belum bisa dipenuhi, akan lebih baik jika generasi berikutnya tetap mengetahui kebenaran dan melanjutkan apa yang menjadi tuntutan pendahulu mereka.

Salah satu aspek dalam rekonsiliasi berdasarkan tulisan Robert Scheiter adalah *Narration of Memory*³⁷. Sebuah usaha untuk mengetahui perbedaan dimensi dalam identitas yang berbeda melalui sudut pandang dua belah pihak. Menjaga agar masa lalu tidak terlupakan dan mengungkapkan kebenaran dapat membangun ulang komunitas yang terpisah³⁸. Dalam hal tersebut, penulis temukan upaya para penyintas dalam *Kosovo Women's*

³⁷ Robert Scheiter. 2008. *Establishing a Shared Identity: The Role of the Healing of Memories and of Narrative*. hal 8-10 dalam Sebastian C. H. Kim, Pauline Kollontai, Greg Hoyland. *Peace and Reconciliation: In Search of Shared Identity*. Pada 17 November 2017.

³⁸ *Ibid.*,

Network yang bekerjasama dengan *The New School* menyajikan sejarah lisan Safete Rogova, salah satu aktivis hak perempuan³⁹.

The Oral History Initiative berusaha mendokumentasikan kisah hidup Kosovo sebelum, selama, dan sesudah perang. Selain mengumpulkan sejarah individu, tim tersebut berencana membuat situs web multi media yang mudah untuk diakses, interaktif, memuat transkrip dalam bahasa Albania dan Inggris dalam bentuk film pendek, foto, dan suara dari wawancara yang dilakukan⁴⁰. Inisiatif tersebut melibatkan KWN dan *The New School*, peneliti dari berbagai generasi, kebangsaan, dan kompetensi, yang misinya adalah untuk merekam kisah hidup yang berkaitan dengan sejarah Kosovo dan peristiwa *ethnic cleansing*.

Meskipun saat ini masih belum terlihat niat baik Serbia untuk memperbaiki hubungan dengan meminta maaf, paling tidak generasi muda tau tuntutan apa yang harus terus dipertahankan. Bagi korban, ingatan masa lalu akan terasa sangat menyakitkan, tapi mereka memiliki kewajiban untuk melindungi dan mewariskan ingatan tersebut sebagai sebuah kebenaran. Hanya dengan menerima masa lalu, hubungan yang baru bisa dimulai kembali. Kapasitas diri untuk menerima dan menjalin hubungan yang baru adalah hal yang sekarang kita kenal sebagai “*peace*”.

5.2.2 *The Interactive Alternative: The Needs-Based Model of the Apology-forgiveness Cycle*

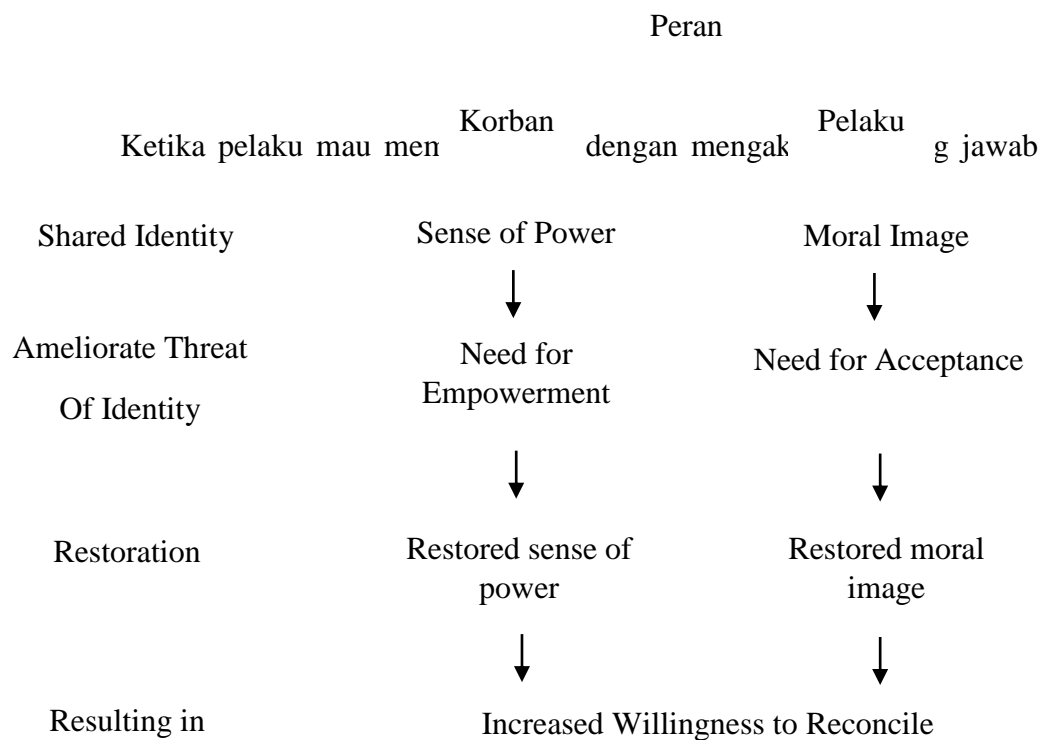
Ide dasar dari model rekonsiliasi ini berasal dari konsekuensi sebuah konflik yang menyebabkan korban dan pelaku menderita atas ancaman terhadap

³⁹ Kosovo Women's Network. 2013. *New School, KWN Screen First Oral History Film*. Diakses dalam <http://www.womensnetwork.org/?FaqlD=1&n=79>. Pada 17 November 2017.

⁴⁰ *Ibid.*,

identitas mereka serta keinginan untuk menghilangkan ancaman tersebut. Sampai pada pemahaman itu, ancaman terhadap sebuah identitas bisa dikatakan sebagai dinding penghalang untuk rekonsiliasi. Model rekonsiliasi ini akan terlihat sebagai babak dimana masing – masing korban dan pelaku secara bersama menghilangkan ancaman terhadap identitasnya.

Bagan 5.1. *The Interactive Alternative: The Needs Based Model of Apology Forgiveness Cycle*



atas kesalahan yang mereka perbuat terhadap korban, hal tersebut memberi korban sebuah jaminan untuk memberi pengampunan⁴¹. Pemulihan terhadap korban seolah mengembalikan kontrol terhadap dirinya yang telah diambil

⁴¹ Arie Nadler dan Nurit Shnabel. *Loc., cit* hal 48-49

selama episode kekerasan berlangsung. Pemulihan itu berimplikasi pada pelaku yang tidak lagi melihat dirinya sebagai orang jahat tidak bermoral.

Shared Identity

Rekonsiliasi adalah sebuah perubahan sikap dan tingkah laku terhadap kelompok lain, atau bisa diartikan sebagai “*penerimaan*” dari masing – masing kelompok sekaligus proses menuju atau mempertahankan penerimaan itu⁴². Rekonsiliasi berimplikasi pada kenyataan bahwa korban dan pelaku tidak melihat masa lalunya sebagai definisi dari masa depan. Mereka bisa mulai menerima dan melihat nilai – nilai kemanusiaan satu sama lain dan melihat kemungkinan untuk membangun hubungannya kembali⁴³.

Baik genosida maupun *ethnic cleansing* atau *intractable conflict* lainnya akan berdampak sangat dalam pada korban (penyintas), tentang persepsi mereka terhadap dirinya dan dunia. Menjadi korban seperti melihat dunia penuh dengan bahaya, membuat mereka merasa kurang dan rentan mengalami kekerasan. Semenjak saat itu, identitas telah mengakar menjadi bagian dalam kelompok, meskipun salah satu anggota dari kelompok korban tidak mengalami kekerasan secara langsung, perlakuan pelaku tetap membekas meninggalkan trauma⁴⁴.

Pelaku juga membawa luka psikologis saat mereka harus menjauhkan diri dari korbannya, sehingga mereka melihat nilai kemanusiaan dalam dirinya kurang dan merasa tidak memiliki empati. Selain itu, anggota kelompok pasif

⁴² Ervin Staub. 2008. *Promoting Reconciliation After Genocide and Mass Killing in Rwanda – And Other Postconflict Settings: Understanding the Roots of Violence, Healing, Shared History, and General Principles*. hal 396 – 398. Dalam Arie Nadler dan Nurit Shnabel. *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. New York: Oxford University.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

pelaku yang tidak terlibat langsung, tapi menyaksikan permusuhan, diskriminasi, dan pembunuhan masal, kemungkinan juga sangat terkait dengan perasaan bersalah⁴⁵. Untuk mengurangi perasaan empati dan mempertahankan rasa terhubung dengan kelompok mereka sendiri, mereka semakin menjauhkan diri dari korban. Sama halnya dengan korban, perasaan itu juga telah mengakar menjadi identitas bagian dalam kelompok.

Disaat episode kekerasan berakhir, pelaku dan kelompok pasifnya cenderung memilih untuk tetap keras kepala, tanpa empati bagi korban dan tanpa memiliki keinginan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, mengatasi luka – luka mereka mungkin dapat mengurangi sikap keras kepala dan membuka kemungkinan bagi mereka untuk rekonsiliasi. Bersama dengan proses rekonsiliasi lainnya, mereka dapat melihat nilai kemanusiaan, merasa empati, menyesal, sedih, dan memiliki keinginan untuk meminta maaf sebagai salah satu bagian penting dari rekonsiliasi.

Singkatnya, menyembuhkan luka korban, sama halnya dengan menyembuhkan pelaku dan kelompok pasif yang terluka karena kekerasan dan kepasifan mereka. Proses penyembuhan tersebut tidak bisa diharapkan akan berlangsung dengan cepat, namun bisa terus diupayakan dengan membangun dialog antara korban dan pelaku untuk saling berbagi cerita dan pengalaman dalam kelompoknya masing – masing. Dari sudut pandang tersebut, penulis melihat salah satu upaya dari para penyintas yang menggambarkan adanya dialog antar etnis dalam rangka berbagi identitas satu sama lain.

⁴⁵ *Ibid.*,

Para penyintas melalui *Kosovo Women's Network* bekerjasama dengan *Women in Black Network* Serbia berhasil membentuk *Women's Peace Coalition*⁴⁶. Koalisi tersebut terdiri atas aktivis dari Kosovo dan Serbia yang berusaha memperjelas perspektif perempuan mengenai upaya perdamaian. Pendirian koalisi tersebut merupakan inisiatif lintas batas negara, melintasi hambatan, perpecahan nasional, etnis, dan agama yang diupayakan para perempuan. Mereka juga menyelenggarakan tiga hari konferensi "*Women, Peace, and Security*" untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam perdamaian⁴⁷.

Selama konferensi berlangsung, koalisi membuat *one-year action plan* yang menyerukan peningkatan upaya dialog antar perempuan dari semua kelompok etnis dari Serbia dan Kosovo melalui pertemuan dan diskusi tentang keamanan bagi kelompok – kelompok terdampak konflik⁴⁸. Pada saat yang sama, *Women in Black* Serbia meminta maaf atas nama rezim Serbia melawan orang Albania di Kosovo. Permintaan maaf mereka disiarkan di Radio dan Televisi Kosovo yang menandai permintaan maaf publik pertama yang dibuat untuk kejahatan yang dilakukan terhadap orang – orang Albania selama perang⁴⁹.

Dalam sebuah situs berita yang penulis temukan, pada Agustus 2013, Presiden Tomislav Nikolic, salah satu tokoh senior Partai Radikal Serbia dan tangan kanan terdakwa *International Criminal Tribunal of the former*

⁴⁶ Kosovo Women's Network. 2013. *Women in Black Network Serbia, KWN From Women's Peace Coalition*. Diakses dalam <https://www.womensnetwork.org/documents/20131205154742885.pdf>. Pada 18 November 2017.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

Yugoslavia (ICTY) Vojislav Seselj, mengutarakan permintaan maaf dan meminta pengampunan atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Serbia di Bosnia selama konflik tahun 1990⁵⁰. Nolic mengajukan permintaan maafnya untuk semua kejahatan perang yang dilakukan atas nama etnis dan atas nama Serbia.

Mungkin hal tersebut merupakan kemajuan paling mengejutkan dalam sejarah keadilan transisional di Serbia ketika seorang Presiden mengutarakan permintaan maafnya pada saat wawancara di salah satu televisi nasional Bosnia. Namun, peristiwa yang sama belum terjadi di Kosovo seperti kebanyakan orang – orang etnis Albania inginkan. Paling tidak, melalui *Kosovo Women's Network*, seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya, telah berhasil membangun koalisi yang akan memfasilitasi tiap – tiap dialog antar etnis demi kemajuan rekonsiliasi.

Kosovo mulai mengerjakan strategi rekonsiliasi, namun para kerabat dan korban perang masih merasa skeptis bahwa keadilan bisa dilakukan setelah 14 tahun konflik berakhir. Kesiapan antara Kosovo dan Serbia masih belum bisa dikatakan cukup, karena sikap moral Serbia dan masyarakat yang kekurangan informasi akurat mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama perang melawan rezim Slobodan Milosevic⁵¹. Menurut penulis, disinilah kinerja *Kosovo Women's Network* dapat dimaksimalkan bagi keberlanjutan hubungan kedua etnis dalam rangka saling berbagi identitas. Dengan membentuk dialog *inter-*

⁵⁰ Marija Ristic. 2013. *Serbia: Controversial Acquittals and an Unusual Apology*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-apology-acquittals-and-regional-cooperation>. Pada 18 November 2017.

⁵¹ Edona Peci. *Loc cit.*,

ethnic, akan membentuk kesempatan keduanya agar bisa mengeliminasi ancaman terhadap identitas masing – masing.

Ameliorate Threat of Identity

Berdasarkan pada episode kekerasan yang telah berlangsung, korban selalu mengespresikan keinginan yang begitu besar akan kebutuhannya terhadap *power and justice*. Disisi lain, pelaku mengekspresikan keinginan yang besar terhadap sebuah pengakuan atau penerimaan (*acceptance*) dari diri korban. Begitulah yang diutarakan oleh Nadler dan Shnabel berdasarkan salah satu penelitiannya. Selanjutnya, korban akan merasa lebih siap untuk merekonsiliasi hubungan bila *need for power* nya telah terpenuhi, sedangkan pelaku merasa lebih siap bila *need for acceptance* telah didupatkannya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengeliminasi ancaman terhadap identitas, masing – masing korban dan pelaku menginginkan agar kebutuhannya terhadap *empowerment* dan *social acceptance* bisa terpenuhi. Selain itu, ketika korban bisa mengekspresikan empatinya terhadap pelaku, hal tersebut sekaligus menunjukkan adanya penerimaan bahwa selama ini mereka juga menderita karena perang.

“Advokasi memainkan peran kunci dalam pemberdayaan perempuan – perempuan muda”. Begitulah *headline* yang tertera dalam salah satu program milik *Kosovo Women’s Network*⁵². Program yang diberi nama *The Young Women’s Empowerment Initiative* (YWEI) mendukung perempuan muda dalam mengembangkan keterampilan mereka untuk bisa memimpin isu – isu yang menjadi perhatian mereka. Inisiatif ini melibatkan seluruh perempuan muda di

⁵² Kosovo Women’s Network. 2013. *Advocacy Plays a Role in Young Women’s Empowerment*. Diakses dalam <http://www.womensnetwork.org/?FaqlD=1&n=125>. Pada 19 November 2017.

Kosovo untuk menjadi katalisator perubahan dan memobilisasi rekan mereka untuk melakukan hal yang sama.

Dalam program tersebut, para perempuan muda berbagi tantangan yang mereka hadapi mengenai perjuangan atas sumber daya yang terbatas, kesempatan kerja yang tidak memadai, dan diskriminasi sistematis yang terjadi hanya karena mereka adalah perempuan⁵³. YWEI juga membuat sebuah *action plan* untuk menangani masalah yang para perempuan hadapi. Mereka memutuskan untuk menyiapkan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan muda, rencana lain yang mereka buat adalah pawai damai yang dilakukan di Ibu Kota Pristhina.

Pada tahun 2013, YWEI telah melibatkan kurang lebih 146 perempuan muda di seluruh Kosovo. Dengan dukungan *Kosovo Women's Network*, mereka berencana untuk melaksanakan *action plan* pada tahun 2014 untuk memberdayakan lebih banyak perempuan muda dalam pengorganisasian dan advokasi hak – hak perempuan, serta memperkuat gerakan perempuan Kosovo. Menyusul *action plan* tersebut, *Kosovo Women' Network* sepenuhnya akan mendukung inisiatif yang melibatkan advokasi didalamnya, mencakup;

- Mengumpulkan perempuan dan melibatkan mereka dalam advokasi dengan otoritas terpilih agar lebih bisa memenuhi prioritas perempuan di komunitas mereka.
- Advokasi pada bank untuk menurunkan suku bunga pinjaman kepada perempuan

⁵³ *Ibid.*,

- Advokasi pada institusi tertentu dalam mempertimbangkan *gender* saat membuat anggaran tahunan mereka
- Melibatkan perempuan dalam mengadvokasi penyediaan transportasi gratis pada semua anak untuk pendidikan wajibnya
- Advokasi kepada institusi lokal dan nasional untuk menyediakan layanan kesehatan
- Membantu perempuan dalam mengadvokasi dan mengklaim hak mereka atas kekayaan yang mereka miliki
- Dan, advokasi subsidi pertanian untuk petani perempuan.

Mengembalikan posisi perempuan dan atau korban perang lain dalam kehidupan masyarakat dengan segala tantangan dan ancamannya bukan menjadi perkara yang mudah. Inisiatif yang melibatkan advokasi para korban diatas tidak bermaksud membatasi peran Pemerintah Kosovo sendiri dalam banyak kontribusinya terhadap rekonsiliasi antara Kosovo dan Serbia. Dari awal pencarian data, penulis berusaha konsisten pada data yang menunjukkan bagaimana upaya *empowering* dijalankan oleh korban / penyintas, yang dalam hal tersebut dijalankan oleh *Kosovo Women's Network* sebagai jejaring. Dari data yang ditemukan, kemudian penulis simpulkan bahwa pesan dari para korban untuk bisa mendapatkan *need for power* nya mampu terpenuhi.

Penulis belum menemukan data yang didalamnya berisikan fakta yang berkaitan dengan pengembalian *need for acceptance* bagi para pelaku. Namun, bila bisa penulis berpendapat, pada penjelasan sebelumnya mengenai *shared identity*, dalam sub bab tersebut *Peace Coalition* antara Kosovo dan Serbia sudah terbentuk, yang mengindikasikan adanya penerimaan masing – masing pihak berkonflik atas identitasnya. Permintaan maaf *Women in Black* Serbia

menggambarkan kesediaan mereka mewakili kelompoknya untuk mengakui kesalahan masa lalu.

Permintaan maaf tersebut bisa diartikan sebagai pesan dari perwakilan kelompok untuk bisa mendapatkan *need for acceptance* nya dari para korban. Karena model rekonsiliasi yang penulis gunakan menekankan pada interaksi antara korban dan pelaku, maka data yang harus ditemukan juga dituntut untuk seimbang. Hanya saja, penulis masih belum menemukan sebuah pernyataan resmi mengenai kepastian *need for acceptance* benar – benar didapatkan atau tidak. Tapi melihat progres kedua pihak yang berhasil membentuk *Peace Coalition*, penulis optimis, setidaknya butuh beberapa waktu lagi agar keduanya benar – benar bisa saling menerima dan memaafkan.

Restoration

Tahap ini merupakan indikator sekaligus tahap terakhir dalam model rekonsiliasi yang penulis gunakan dalam menganalisa rekonsiliasi Kosovo dan Serbia. Masih berhubungan dengan indikator sebelumnya, sebuah pesan mengenai adanya *social acceptance* dan *empowerment* akan memenuhi kebutuhan emosional korban dan pelaku, kemudian akan terhubung dengan keinginan yang lebih besar untuk melakukan rekonsiliasi. Penulis menilai bahwa rekonsiliasi antara etnis Albania di Kosovo dan Serbia belum pada tahap *Restoration* atau bisa dikatakan sebagai tahap dimana kebutuhan dan ancaman terhadap identitas korban dan pelaku telah terpenuhi.

Beberapa alasan yang bisa penulis jelaskan diantaranya adalah absennya otoritas tertinggi Serbia dalam aspek *responsibility*. Presiden Hashim Tachi mengumumkan pembentukan *Truth and Reconciliation Commission* yang

baru pada awal tahun ini, yang menurutnya dimaksudkan untuk mendorong proses saling memaafkan antara kalangan Albania dan Serbia di Kosovo⁵⁴. Jika muncul pertanyaan apakah permintaan maaf atau rekonsiliasi yang harus didahulukan? Maka sebenarnya rekonsiliasi tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Rekonsiliasi terjadi atas kemauan korban dan pelaku untuk mencapainya. Bagaimana hal tersebut bisa diwujudkan apabila aspek *responsibility* terlewat dari prosesnya.

Hal yang sama pun terjadi dalam aspek *ameliorate threat of identity* dimana, *need for acceptance* bagi pelaku masih belum terlihat dengan jelas dari dialog yang difasilitasi oleh *Kosovo Women's Network. Women in Black Serbia* memang telah mengutarakan permintaan maafnya sebagai perwakilan kelompok pelaku, namun respon etnis Albania terhadap permintaan maaf tersebut belum penulis ketahui. Beberapa tahun terakhir penulis menilai bahwa upaya – upaya yang terlihat masih berfokus pada pengembalian kebutuhan emosional korban. Oleh karena itu, menurut penulis, *restoration* dari sisi pelaku masih belum tercapai sepenuhnya.

Sub variabel *Revenge* menunjukkan dengan jelas bagaimana keinginan korban untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku. Sedangkan indikator *Social Distancing* menunjukkan bahwa Pemerintah Serbia sampai saat ini masih belum mengakui etnis Albania sebagai salah satu korban kejahatan rezim masa lalu. Kedua indikator awal, dalam variabel *Unilateral Alternative*

⁵⁴ Die Morina dan Doruntina Baliu. 2017. *Kosovo's Tachi Announces Post-War Reconciliation Commission*. Diakses dalam <http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-s-president-with-an-initiative-of-reconciliation-02-13-2017>. Pada 21 November 2017.

berusaha menunjukkan upaya sepihak korban dan pelaku agar lebih siap memulai rekonsiliasi.

Dimulai dari sub variabel *Shared Identity*, hubungan antar etnis mulai terlihat dalam komunikasi antara pihak Albania dan Serbia. Sebuah koalisi antara perempuan Albania dan Serbia pun berhasil dibentuk dalam rangka untuk saling berbagi permasalahan terhadap identitas mereka sebagai korban dan pelaku. Selanjutnya, sub variabel *Ameliorate Threat of Identity* berusaha memastikan bahwa setelah komunikasi berhasil dijalin, pesan dari korban terhadap kebutuhan mereka akan *empowerment* berhasil dipenuhi.

Penjelasan diatas merupakan elaborasi dari beberapa sub variabel dalam variabel konsep *Socioemotional Reconciliation* yang berusaha penulis sampaikan pada pembaca. Realitas bahwa, poin penting beberapa indikator yang telah dan masih belum terpenuhi tidak menjadi standar kesiapan diri korban dan pelaku. Sekali lagi, keinginan untuk merekonsiliasi hubungan datangnya atas kemauan kedua pihak dan hal tersebut tidak dicapai dengan instan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Melalui kerangka pikir *Socioemotional Reconciliation*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum terlihat kesiapan antara penyintas *ethnic cleansing* dan Pemerintah Serbia dalam merekonsiliasi konflik Kosovo dan Serbia. Kesimpulan tersebut penulis ambil berdasarkan dari tindakan sepihak (*revenge* dan *social distancing*) yang nyatanya tidak berdampak banyak pada perbaikan hubungan kedua pihak. *Revenge* membuat lingkaran kekerasan terus berlanjut yang menyebabkan keinginan untuk terus bermusuhan, sedangkan *social distancing* membuat Pemerintah Serbia semakin jauh mengakui kesalahannya.

Satu – satunya tindakan yang memfasilitasi perbaikan hubungan adalah *shared identity* dimana dialog antar etnis bisa diwujudkan meskipun bukan antara penyintas dan Pemerintah Serbia secara langsung. Terciptanya *peace coalition* akan menjembatani dialog berkelanjutan antar etnis yang menandai adanya pembaruan keinginan berkomunikasi antara etnis Albania dan Serbia. Hal tersebut akan menjadi sarana bagi kedua pihak untuk bisa menerima satu sama lain.

Menginisiasi program pemberdayaan terutama bagi perempuan – perempuan muda dan melakukan advokasi terhadap mereka agar terlibat dalam seluruh aspek kemasyarakatan di Kosovo yang saat ini terlihat. Namun upaya yang ditujukan untuk menjamin penerimaan dari etnis Albania terhadap orang – orang Serbia masih belum terlihat. Jaminan bahwa Pemerintah Serbia akan bertanggung jawab juga belum dapat dipastikan.

Kekurangan terhadap hal itu tidak menjadi standar bagi kelangsungan rekonsiliasi antara Kosovo dan Serbia. Kesiapan penyintas dan Pemerintah Serbia masih terbatas oleh waktu penelitian. Seperti yang banyak penstudi Hubungan Internasional ketahui bahwa, mengidentifikasi kasus yang melibatkan aktivitas rekonsiliasi didalamnya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sedangkan kasus di Kosovo sendiri terbilang sebagai kasus yang baru terjadi.

6.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema dan konsep serupa dengan penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan pemilihan kasus dan rentang waktu terjadinya konflik sampai terdapat upaya rekonsiliasi. Hal ini dikarenakan konsep *Socioemotional Reconciliation* bukan konsep yang memiliki kerangka pikir untuk melihat proses rekonsiliasi. Konsep tersebut berisikan tentang kondisi dimana korban dan pelaku mempersiapkan dirinya menuju rekonsiliasi.

Perlu juga digaris bawahi bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melihat proses rekonsiliasi Kosovo dan Serbia, melainkan untuk mengidentifikasi persiapan menuju proses rekonsiliasi. Selain itu, membutuhkan rentang waktu cukup lama mengingat yang akan diidentifikasi adalah aktivitas rekonsiliasi dalam sebuah konflik. Oleh karena itu, pastikan sebelum menggunakan konsep ini, perlu untuk mempertimbangkan bagaimana aktivitas rekonsiliasi yang sudah berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber e-Book

- Nadler, A., E. M. T., & D. F. J. (2008). *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation*. New York: Oxford University.
- Nadler, A. (2012). Intergroup Reconciliation. Dalam A. Nadler, *Intergroup Reconciliation: Definitions, Processes, and Future Directions* (hal. 293). Research Gate.
- Lederach, J. P. (1999). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: Endowment of the United States Institute of Peace.
- Porter, E. (2007). *Peacebuilding: Women in International Perspective*. USA and Canada: Routledge.
- Whittaker, D. J. (2002). *Conflict and Reconciliation in the Contemporary World*. USA and Canada: Routledge.
- Bloomfield, D., Barnes, T., & Huyse, L. (2003). *Reconciliation After Violent Conflict; A Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Murphy, C. (2010). *A Moral Theory of Political Reconciliation*. New York: Cambridge University Press.
- Kim, S. C., Kollontai, P., & Hoyland, G. (2008). *Peace and Reconciliation In Search of Shared Identity*. USA and England: Ashgate Publishing Company.
- Schreiter, R. (2008). Establishing a Shared Identity: The Role of the Healing of Memories and of Narrative. Dalam S. C. Kim, P. Kollontai, & G. Hoyland, *Peace and Reconciliation: In Search of Shared Identity* (hal. 8-10). USA: Ashgate Publishing Limited.
- Staub, E. (2008). Promoting Reconciliation After Genocide and Mass Killing in Rwanda - And Other Postconflict Settings: Understanding the Roots of Violence, Healing, Shared History, and General Principles. Dalam A. Nadler, & N. Shnabel, *The Social Psychology of Intergroup Reconciliation* (hal. 396-398). New York: Oxford University.

Sumber e-Jurnal

- Dobber, S. (2013). *Reconciliation Initiatives in Kosovo: A Political Psychological Analysis*, 34-47.
- Grudina, J. (2012). *Bridging Separated Communities With the Use of Common Instrumental Goals: The Case of Kosovo Community Reconciliation and Development Programme*, 25-32.

Lake, D. A., & Rothchild, D. (2008). *Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict*, 41-46.

Sumber Artikel dan Website

Wang, C. (2015). *Kosovo Field Trip Report*. University of Vienna.

Aliu, F. (2012). *Kosovo: Serbia Should Apologise for its Crimes*. Diambil kembali dari Balkan Insight: <http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-serbia-to-apologize-for-the-crimes-it-committed>

Andreopoulos, G. J. (2017). *Encyclopedia Britannica*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica, Inc: <https://www.britannica.com/topic/ethnic-cleansing>

Baliqi, B. (2012). *Security Sector Reform in Kosovo: From institutional transitions to the democratic consolidation*. Diambil kembali dari <http://ssm.com/abstract=2421264>

Bekaj, A. R. (2010). The KLA and The Kosovo War: From Intra-State Conflict to Independence Country. 16-37. Diambil kembali dari http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/Transitions_Series/transitions8_kosovo.pdf

Brunborg, H. (2002). *Report on the size and ethnic composition of the population of kosovo*, 1-17. Diambil kembali dari http://www.icty.org/x/file/About/OTP/War_Demographics/en/milosevic_kosovo_020814.pdf

Cady, J. C. (t.thn.). *The United Nations and Security Sector Reform in Kosovo*. Diambil kembali dari <https://www.un.org/ruleoflaw/files/Cady.pdf>

Canga, E. (2011). *Uncomfortable Truth: War Crimes in the Balkans*. Diambil kembali dari Balkan Insight: <http://www.balkaninsight.com/en/article/uncomfortable-truths-war-crimes-in-the-balkans>

Chick, K. (2016). *Ending the Shame of Kosovo's Rape Victims*. Diambil kembali dari The Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2016/02/22/therapevictimsosofkosovobosniacommission/>

Clinton, B. (2017). *Dayton Accords: International Agreement*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/event/Dayton-Accords>

Djuric, V. (2017). *Serbian Presidential andidates Avoid "Painful" War Issues*. Diambil kembali dari Balkan Insight: <http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-presidential-candidates-avoid-painful-war-issues-03-17-2017>

Farquhar, M., & Anderson, J. (2007). *Serb Leader's Death "Tragic for Victims"*. Diambil kembali dari Balkan Insight: <http://www.balkaninsight.com/en/article/serb-leader-s-death-tragic-for-victims>

Fteja, I. (2017). *Women's Rights in Kosovo*. Diambil kembali dari Porridge: <https://porridgemagazine.com/2017/09/19/womens-rights-in-kosovo-iliriana-fteja/>

- Hoxha, L., & Shima, A. (2013). *Mission Report: Mapping of Local Initiatives on Women, Peace, and Security in Kosovo 1999-2012*.
http://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/womenPub/UNDP_ENG_FINAL.pdf:
 UNDP.
- Husarska, A. (1998). *Opinion: Milosevic Shows His True Colors on Education Accord*. Diambil kembali dari The New York Times:
<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB5N3yvbWAhXCpPQKHe9vD1kQFghfMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F1998%2F09%2F05%2Fopinion%2Fmilosevic-shows-his-true-colors-on-education-accord.html&usg=AOvVa>
- Lampe, J. R. (2017). *Bosnian Conflict: European History [1992-1995]*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/event/Bosnian-conflict>
- Marku, H. (2015). *What it means to be a woman and survivor of war in Kosovo*. Diambil kembali dari Open Democracy: <https://www.opendemocracy.net/5050/hana-marku/what-it-means-to-be-woman-and-survivor-of-war-in-kosovo>
- Peci, E. (2013). *Kosovo War Victims Nor Ready for Serbia Reconciliation*. Diambil kembali dari Balkan Insight: <http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-victims-not-ready-to-reconcile-with-serbia>
- Ristic, M. (2013). *Serbia: Controversial Acquittals and an Unusual Apology*. Diambil kembali dari Balkan Insight: <http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-apology-acquittals-and-regional-cooperation>
- Ward, V. (2017). *Serbian War Criminals: Slobodan Milosevic Profile*. Diambil kembali dari The Telegraph: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/serbia/8538575/Serbian-war-criminals-Slobodan-Milosevic-profile.html>
- Shala, S. J. (2015). *Demilitarization in Kosovo: A story of "Success"*. Diambil kembali dari Countering Violent Extremism Initiative: <https://cve-initiative.org/2015/10/05/demilitarization-in-kosovo-a-story-of-success/>
- Sharlach, L. (2000). *Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda*. Diambil kembali dari <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/713687893>
- Speake, B. (2013, February 11). *A Gendered Approach to Peacebuilding and Conflict Resolution*. Diambil kembali dari E-International Relations Students: <http://www.e-ir.info/2013/02/11/a-gendered-approach-to-peacebuilding-and-conflict-resolution/>
- Sullivan, C. (2017). *Kosovo Liberation Army: Kosovar Militant Group*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/Kosovo-Liberation-Army>
- Manashaw. (2004). *GENOCIDE AND ETHNIC CLEANSING: WHY THE DISTINCTION? A DISCUSSION IN THE CONTEXT OF ATROCITIES OCCURRING IN SUDAN*. Diambil kembali dari CWSL Scholarly Commons:
<http://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1168&context=cwilj>
- Michael, L. (t.thn.). *Kosovo Chronology: Background Condition*. Diambil kembali dari University of Southern California: <http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/database/Kosovo/kosovo.pdf>

- Mikulaschek, C. (t.thn.). *THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: POLICY, PROCESS, AND PRACTICE*. Diambil kembali dari International Coalition for The Responsibility to Protect: <http://responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/3347-christoph-mikulasche-the-united-nations-security-council-and-the-responsibility-to-protect-policy-process-and-practice-report-from-the-39th-international-peace-ins>
- Ward, J., & Marsh, M. (2006, June). *Sexual Violence Against Women and Girls in War and Its Aftermath: Realities, Responses, and Required Resources*. Diambil kembali dari United Nations Population Fund: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CCEF504C15AB277E852571AB0071F7CE-UNFPA.pdf>
- Behrendt, L. (2012). *Discover Stories: The Stolen Generation*. Diambil kembali dari Australians Together: <http://www.australianstogether.org.au/stories/detail/the-stolen-generations>
- Armed Conflict: The Impact of Armed Conflict on Society*. (t.thn.). Diambil kembali dari www.un.org/esa/socdev/rwss/.../15%20Armed%20Conflict.pdf
- BBC News. (2017). *Kosovo Profile*. Diambil kembali dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-18328859>
- Central Intelligence Agency. (2017). *The World Factbook*. Diambil kembali dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>
- Human Right Watch. (1996, September). *SHATTERED LIVES: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath*. Diambil kembali dari Human Right Watch: <https://www.hrw.org/reports/1996/Rwanda.htm>
- Human Right Watch. (1999). *Federal Republic of Yugoslavia; Abuse Against Serbs and Roma in The New Kosovo*. Diambil kembali dari <https://www.hrw.org/reports/1999/kosov2/>
- Human Right Watch. (2000). *Kosovo: Rape as Weapon of "Ethnic Cleansing"*. Diambil kembali dari <http://www.refworld.org/docid/3ae6a87a0.html>
- Human Right Watch. (2000, March 20). *Serb Gang-Rapes in Kosovo Exposed*. Diambil kembali dari Human Right Watch: <https://www.hrw.org/news/2000/03/20/serb-gang-rapes-kosovo-exposed>
- Human Right Watch. (2001). *UNDER ORDERS: War Crimes in Kosovo*. Diambil kembali dari Human Right Watch: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Under_Orders_En_Combined.pdf
- International Committee of the Red Cross. (2017). *Practice Relating to Rule 129. The Act of Displacement: Section C. Ethnic cleansing*. Diambil kembali dari International Committee of the Red Cross: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter38_rule129_sectionc

- Kosovar Institute for Policy Research and Development. (2013). *The Implementation of Agreements of Kosovo-Serbia Political Dialogue*. Diambil kembali dari http://www.kipred.org/repository/docs/THE_IMPLEMENTATION_OF_AGREEMENTS_OF_KOSOVO%E2%80%90SERBIA_POLITICAL_DIALOGUE_373680.pdf
- Kosovo Women's Network. (2011). *1325 Facts & Fables; A collection of stories about the implemetation of United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security in Kosovo*. Pristhina: Kosovo Women's Network.
- Kosovo Women's Network. (2017). *Support Women's Rights*. Diambil kembali dari Kosovo Women's Network: <http://www.womensnetwork.org/?FaqeID=22>
- Nobel Women's Initiative. (2011, May). *War on Women: Time for Action to End Sexual Violence in Conflict*. Diambil kembali dari Nobel Women's Initiative: <http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2013/09/war-on-women-web.pdf>
- Oxford University Press. (2007). The European Journal of Public Health Advance Access. '*Ethnic cleansing*' bleaches the atrocities of genocide, 1-6.
- UN Women. (2016). *THE CONFLICT DID NOT BRING US FLOWERS: The Need for Comprehensive Reparations for Survivors of Conflict- Related Sexual Violence in Kosovo*. Kosovo: UN Women.
- UN Women. (t.thn.). *Commission on the Status of Women*. Diambil kembali dari UN Woven: <http://www.unwomen.org/en/csw>
- United Nations Archive. (2017). *International Conference on the Former Yugoslavia (ICFY)*. Diambil kembali dari <https://search.archives.un.org/international-conference-on-former-yugoslavia-icfy>
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women*. Diambil kembali dari UN Women: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- United Nations Mission in Kosovo. (2017). *Mandate*. Diambil kembali dari United Nations: <https://unmik.unmissions.org/mandate>
- United Nations Peacekeeping. (2016). *Women, Peace and Security*. Diambil kembali dari United Nations: <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/wps.shtml>
- United Nations: Office on Genocide and the Resposibility to Protect. (2016). *Ethnic Cleansing: Background*. Diambil kembali dari United Nations: <http://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.html>
- United Nations: Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. (2016). *Ethnic Cleansing: Definition*. Diambil kembali dari United Nations: <http://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.html>
- United States Departement of State. (2017). *Office of The Hostorian*. Diambil kembali dari A Guide to the United States' History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: Kosovo: <https://history.state.gov/countries/kosovo>.
- Wheeling Jesuit University. (2002). *The Balkans: Kosovo within Yugoslavia*. Diambil kembali dari <http://www.cotf.edu/earthinfo/balkans/kosovo/KVtopic4.html>

Women's International League for Peace and Freedom. (2012, October 30). *Support the Kosovo Women's Network*. Diambil kembali dari Women's International League for Peace and Freedom: <http://wilpf.org/support-the-kosovo-womens-network/>

World Population Review. (2017). *Kosovo Population*. Diambil kembali dari <http://worldpopulationreview.com/countries/kosovo-population/>